



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2018



bag.organisasisetdakobar@gmail.com



Jl. Sultan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun



(0532) 23752

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-NYA, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif, LKjIP merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Searah dengan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022. RPJM Daerah tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana realisasi Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Kebijakan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, diperlukan suatu laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diukur atas dasar penilaian terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung terwujudnya **"Gerakan Membangun Kotawaringin Barat menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas"**.

Pangkalan Bun, 28 Maret 2019

 **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 6 Misi, 6 Tujuan, 19 Sasaran dan 36 Indikator Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran untuk tahun kedua (tahun 2018) periode perencanaan 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Misi I meliputi 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (lebih dari 100 %) dan 6 indikator sasaran kategori baik (lebih dari 75 % sd. 100 %).

2. Misi II meliputi 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran kategori baik sekali (lebih dari 100 %) dan 3 indikator sasaran kategori baik (lebih dari 75 % sd. 100 %) serta 1 indikator sasaran kategori cukup baik (55 % s.d 75 %).

3. Misi III meliputi 1 tujuan, 6 sasaran dan 13 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 9 indikator sasaran kategori baik sekali (lebih dari 100 %) dan 3 indikator sasaran kategori baik (lebih dari 75 % sd. 100 %) serta 1 indikator sasaran kategori kurang (Kurang 55 %).

4. Misi IV meliputi 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (lebih dari 100 %) dan 1 indikator sasaran kategori cukup baik (55 % s.d 75 %) serta 2 indikator sasaran kategori kurang (Kurang 55 %).

5. Misi V meliputi 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik (lebih dari 75 % sd. 100 %).

6. Misi VI meliputi 1 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator sasaran kategori baik sekali (lebih dari 100 %).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 (sembilan belas) sasaran dengan **36 (tiga puluh enam) indikator kinerja**, diketahui bahwa **18 indikator sasaran** atau **50 % Baik Sekali**, **13 indikator sasaran** atau **36,11 % Baik**, dan **2 indikator sasaran** atau **5,56 % Cukup Baik**, dan **3 indikator sasaran** atau **8,33 % Kurang**. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **126,90 %** atau bermakna **Sangat Baik**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 adalah **Sangat Baik**. Capaian kinerja tahun 2018 mencapai **126,90 %** mengalami kenaikan 30,21 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 yang mencapai **96,69 %**.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat	2
1.2.1. Kondisi Geografis	2
1.2.2. Kondisi Demografis	4
1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi	7
1.2.4. Kondisi Pemerintahan	7
1.2.5. Jumlah Aparatur Sipil Negara	15
BAB II: RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.1.1. Visi	12
2.1.2. Misi	15
2.1.3. Tujuan dan sasaran	15
2.1.4. Strategi dan Arah kebijakan	25
2.1.4.1. Strategi Pembangunan Daerah	25
2.1.4.2. Strategi Arah kebijakan	30
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
2.3. Rencana Kinerja Tahunan	33
2.4. Perjanjian Kinerja	34
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	38
3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	44
3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	87
BAB IV: PENUTUP	96
LAMPIRAN	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Piramida Penduduk Kotawaringin Barat
Tabel 1.2.	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tabel 1.3.	Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tabel 1.4.	Jumlah Aparatur Sipil Negara
Tabel 2.1.	Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tabel 2.2.	<i>Strenght</i> (Kekuatan)
Tabel 2.3.	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
Tabel 2.4.	<i>Opportunity</i> (Peluang)
Tabel 2.5.	<i>Threat</i> (Ancaman)
Tabel 2.6.	Strategi SWOT
Tabel 2.7.	Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan
Tabel 2.8.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Barat
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Ordinal
Tabel 3.2.	Pencapaian Indikator Sasaran
Tabel 3.3.	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Tabel 3.4.	Analisis Pencapaian Sasaran 1.1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.
Tabel 3.5.	Analisis Pencapaian Sasaran 1.2. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Tabel 3.6.	Analisis Pencapaian Sasaran 1.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tabel 3.7.	Analisis Pencapaian Sasaran 1.4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Tabel 3.8.	Analisis Pencapaian Sasaran 2.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
Tabel 3.9.	Analisis Pencapaian Sasaran 2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tabel 3.10.	Analisis Pencapaian Sasaran 2.3. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga



Tabel 3.11.	Analisis Pencapaian Sasaran 3.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan
Tabel 3.12.	Analisis Pencapaian Sasaran 3.2. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.
Tabel 3.13.	Analisis Pencapaian Sasaran 3.3. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.
Tabel 3.14.	Analisis Pencapaian Sasaran 3.4. Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor-Sektor Strategis
Tabel 3.15.	Analisis Pencapaian Sasaran 3.5. Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber-Sumber Ekonomi
Tabel 3.16.	Analisis Pencapaian Sasaran 3.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana.
Tabel 3.17.	Analisis Pencapaian Sasaran 4.1. Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama
Tabel 3.18.	Analisis Pencapaian Sasaran 4.2. Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Tabel 3.19.	Analisis Pencapaian Sasaran 4.3. Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak
Tabel 3.20.	Analisis Pencapaian Sasaran 5.1. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum.
Tabel 3.21.	Analisis Pencapaian Sasaran 6.1. Meningkatnya Industri Kepariwisata.
Tabel 3.22.	Analisis Pencapaian Sasaran 6.2. Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya
Tabel 3.23.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2019
Tabel 3.24.	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan aturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten / Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain, sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Laporan Kinerja disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut dan menjadi media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang diperlukan.

1.2. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

1.2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Bagian Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) dengan Ibukota Pangkalan Bun.



Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat setelah pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemekaran Wilayah seluas 10.759 Km² atau sekitar 6,21 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, terletak antara 110°05'26" sampai 112°50'36" Bujur Timur dan antara 1°19'35" sampai 3°36'59" Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan.

Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 27,4 °C, suhu maksimum antara 31,7 - 33,2 °C, suhu minimum 21,6 - 23,4 °C, kelembaban nisbi berkisar antara 83 - 89 % dan curah hujan sebesar 2.963,4 mm dengan hari hujan 216 hari.

Berdasarkan fisiografi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu: dataran, daerah datar-berombak, daerah berombak-berbukit dan daerah berbukit – bukit, dengan ketinggian wilayah berada pada ketinggian 0 - lebih 400 m dpl.

Berdasarkan hidrologinya Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 3 daerah aliran sungai (DAS), yaitu: DAS Kumai, DAS Lamandau dan DAS Arut, dengan perairan pantai dengan panjang garis pantai 100 Km.

Dilihat dari jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dibedakan menjadi enam jenis yakni: Podsolik merah kuning, Laterik, Regosol-Podsol, Latosol, Alluvial dan Organosol, dengan kelerengan tanah antara 0 – 40 %. Berdasarkan jenis tanah tersebut memiliki klasifikasi lahan bervariasi dengan tingkat kesuburan Klas



IV sampai dengan Klas VII, yang mana lahan klas ini sangat cocok untuk tanaman keras dan perkebunan. Menurut satuan wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 kecamatan yang terbagi dalam 13 Kelurahan dan 81 Desa.

1.2.2. Kondisi Demografis

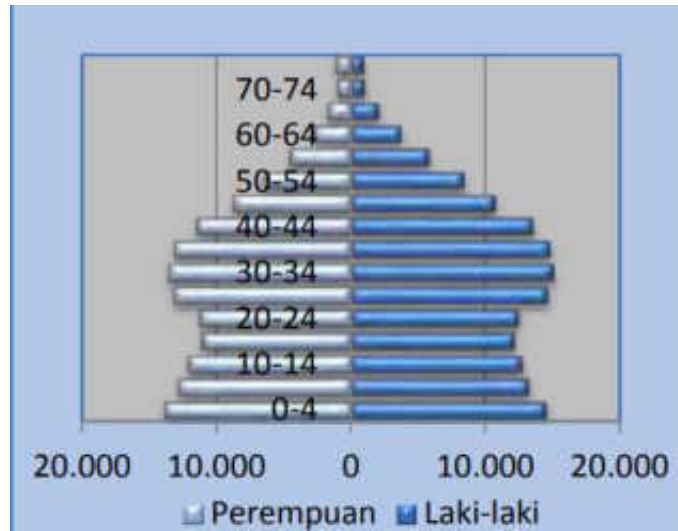
Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2017 Sebanyak 295.349 Jiwa yang Terdiri Atas 156.549 Jiwa Penduduk Laki-Laki dan 138.800 Jiwa Penduduk Perempuan. dibandingkan Dengan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2016, Penduduk Kotawaringin Barat Mengalami Pertumbuhan Sebesar 3,01 Persen Dengan Masing-Masing Persentase Pertumbuhan Penduduk Laki-Laki Sebesar 3,07 Persen dan Penduduk Perempuan Sebesar 2,95 Persen. Sementara Itu Besarnya Angka Rasio Jenis Kelamin Tahun 2017 Penduduk Laki-Laki Terhadap Penduduk Perempuan Sebesar 113. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Sebesar 28 Jiwa/Km² Dengan Rata-Rata Jumlah Penduduk Per Rumah Tangga 4 Orang. Kepadatan Penduduk di Keenam Kecamatan Cukup Beragam Dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi Terletak di Kecamatan Pangkalan Lada Dengan



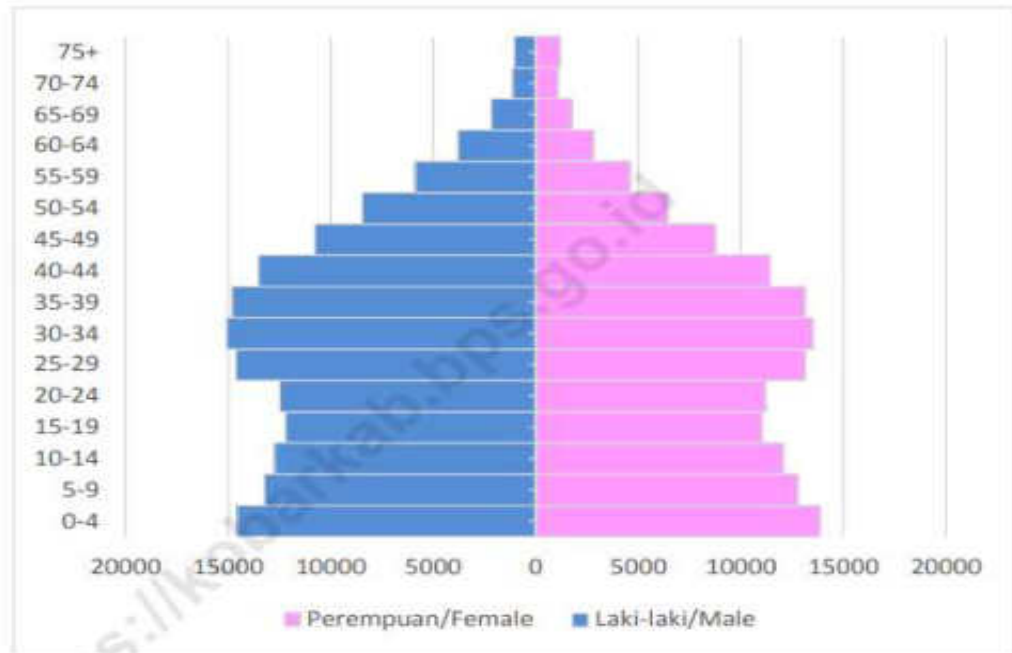
Kepadatan Sebesar 150 Jiwa/Km² dan Terendah di Kecamatan Arut Utara Sebesar 7 Jiwa/Km².

Tabel 1.1. Piramida Penduduk Kotawaringin Barat



Sumber : data diolah oleh Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2. Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 – 2020 (BAPPENAS, BPS dan UNFPA)



Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	14 547	13 846	28 393
5-9	13 236	12 793	26 029
10-14	12 727	12 073	24 800
15-19	12 185	11 036	23 221
20-24	12 492	11 196	23 688
25-29	14 630	13 123	27 753
30-34	15 081	13 523	28 604
35-39	14 812	13 099	27 911
40-44	13 534	11 421	24 955
45-49	10 787	8 768	19 555
50-54	8 480	6 455	14 935
55-59	5 864	4 591	10 455
60-64	3 813	2 817	6 630
65-69	2 180	1 773	3 953
70-74	1 117	1 095	2 212
75+	1 064	1 191	2 255
Kotawaringin Barat 2017	156 549	138 800	295 349

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 – 2020 (BAPPENAS, BPS dan UNFPA)



1.3. Pertumbuhan Ekonomi

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Sedangkan pendapatan perkapita mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat tiap tahun.

PDRB per kapita Kotawaringin Barat menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PDRB perkapita sebesar 50,86 juta rupiah naik pada tahun 2017 menjadi sebesar 55,42 juta rupiah. Kenaikan ini tidak terlepas dari aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha Kotawaringin Barat yang terus menggeliat.

Fenomena yang menarik terjadi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 yang mengalami percepatan yang cukup signifikan. Hal ini dipicu oleh dua kategori lapangan usaha pemberi kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan. Percepatan ini khususnya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi perkebunan kelapa sawit dan hasil industri turunannya.

Kontribusi pembentukan PDRB Kotawaringin Barat tahun 2017 didominasi oleh empat lapangan usaha unggulan, yaitu industri pengolahan yaitu sebesar 26,11 persen, disusul pertanian, kehutanan dan perikanan oleh sebesar 26,00 persen, perdagangan dan reparasi sebesar 12,54 persen dan konstruksi sebesar 8,76 persen. Adapun lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi sebesar 26,59 persen.

1.4. Kondisi pemerintahan

Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini dipimpin oleh seorang Bupati Perempuan yaitu **Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H.** dan Wakil Bupati **AKHMADI RIANSYAH**



Dalam menjalankan tugasnya, Bupati dibantu oleh perangkat pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hasil penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah tersebut dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 15. Dinas Pariwisata;
 16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 18. Dinas Ketahanan Pangan;
 19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Dinas Perikanan;
 21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 22. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Arut Selatan
 2. Kecamatan Arut Utara
 3. Kecamatan Kumai



4. Kecamatan Kotawaringin Lama
 5. Kecamatan Pangkalan Lada
 6. Kecamatan Pangkalan Banteng
- g. Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebanyak 13 kelurahan dan 81 desa.

Selain Perangkat Daerah tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

1.5. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data Simpeg Tahun 2018 sebanyak 4071 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2030 orang dan perempuan sebanyak 2041 orang.



Tabel 1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	17	5	22
2	SLTP	21	9	30
3	SLTA	491	290	781
4	DIPLOMA-I	8	10	18
5	DIPLOMA-II	210	228	438
6	DIPLOMA-III	277	498	775
7	SARJANA MUDA	31	47	78
8	DIPLOMA-IV	47	27	74
9	DOKTER SPESIALIS	12	12	24
10	STARATA 1	806	866	1672
11	STARATA 2	109	49	158
12	STARATA 3	1	0	1
JUMLAH TOTAL		2030	2041	4071

Sumber : Data diolah oleh BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis atau yang disebut RENSTRA Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup Visi, Misi, Strategi, Prioritas Pembangunan Program Kepala Daerah dan Indikator sasaran yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dan dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

**”GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU
KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**



Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gerakan Membangun

Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Kejayaan

Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inspiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten.

c. Kerja Nyata

Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif, dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif dan berdampak nyata pada kemajuan daerah.

d. Iptek dan Infrastruktur

Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem



infrastruktur antar wilayah guna membuka peluang Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya.

e. Ketakwaan

Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang agamis, tentram dan damai.

f. Harmonis

Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak menyebarkan fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat.

g. Langgeng

Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kotawaringin Barat.

h. Aman

Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan, mengenali kerentanan Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat perlindungan masyarakat.

i. Sejahtera

Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan.



2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi pasangan Bupati Hj. Nurhidayah, S.H., M.H dan Wakil Bupati Ahmadi Riansyah ditetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

2.1.3. Tujuan dan sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan 8 (delapan) tujuan, yaitu sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sasaran :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan;

Indikator Kinerja :



- Opini WTP BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan;

Indikator Kinerja :

- Nilai/predikat AKIP
 - Indeks professional aparatur
 - Nilai/predikat Maturitas SPIP
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Indikator Kinerja :

- Sistem pemerintah berbasis elektronik (*e-Government*)
 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Indikator Kinerja :

- Persentase telah tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Sasaran :

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;

Indikator Kinerja :

- Angka Harapan Lama Sekolah
- Rata-rata Lama Sekolah
- Jumlah Pengunjung perpustakaan/tahun



2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Indikator Kinerja :

- Angka Harapan Hidup
- Persentase Lembaga Layanan Kesehatan Yang Terakreditasi

3. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.

Indikator Kinerja :

- Jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi

Tujuan 3 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan.

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan.

Indikator Kinerja :

- Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
- Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
- Persentase pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

2. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.

Indikator Kinerja :

- Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN
- Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

3. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infratraktur Ekonomi.



Indikator Kinerja :

- Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten

4. Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis

Indikator Kinerja :

- Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk

5. Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi

Indikator Kinerja :

- Tingkat Pengangguran Terbuka

6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana

Indikator Kinerja :

- Indeks Kualitas Air
- Indeks Kualitas Udara
- Indeks Kualitas Hutan
- Indeks Kualitas Bencana

Tujuan 4 : Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis.

Sasaran :

1. Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama

Indikator Kinerja :

- Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)

2. Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa



Indikator Kinerja :

➤ Presentase Desa Mandiri

3. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak

Indikator Kinerja :

➤ Indeks Pemberdayaan Gender

➤ Kategori Kabupaten Layak Anak

Tujuan 5 : Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Sasaran :

1. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum

Indikator Kinerja :

➤ Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan

Tujuan 6 : Peningkatan Pariwisata Daerah.

Sasaran :

1. Meningkatkan industry kepariwisataan

Indikator Kinerja :

➤ Rata-rata lama tinggal

➤ Jumlah wisatawan mancanegara

➤ Jumlah wisatawan nusantara

➤ *Spending Of Money*



2. Meningkatkan kelestarian seni dan cagar budaya

Indikator Kinerja :

- Persentase cagar budaya yang lestari

Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat

Visi : Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas												
Misi		Tujuan			Sasaran Strategis							
		Uraian		Indikator Kinerja	Uraian		Indikator Kinerja					
1	2	3	4	5	6	7	8					
I	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;	1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	1	Opini atas audit BPK				
					2	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	2	Nilai SAKIP Kabupaten	3	Indeks Profesionalitas Aparatur	4	Maturitas SPIP
					3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan	5	Sistem pemerintah berbasis elektronik (e-Government)				

					Pemanfaatan Teknologi Informasi	6	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik
					4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	7	Persentase telah tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
II	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olah raga;	2	Meningkatkan kualitas kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	5 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	8	Angka Harapan Lama Sekolah
						9	Rata-rata Lama Sekolah
						10	Jumlah Pengunjung perpustakaan/ tahun
					6 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;	11	Angka Harapan Hidup
						12	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan Yang Terakreditasi
					7 Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.	13	Jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi

III	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;	3	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan.	Pertumbuhan Ekonomi	8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan.	14	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
							15	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
							16	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan
							17	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
					9	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.	18	Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN
							19	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah
					10	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan	20	Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten

					Infratraktur Ekonomi.			
				Angka Kemiskinan.	11	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	21	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk
					12	Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumbersumber ekonomi	22	Tingkat Pengangguran Terbuka
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	23 24 25 26	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Hutan Indeks Kualitas Bencana
IV	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat	4	Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis.	Indeks Pembangunan Masyarakat	14	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	27	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)
					15	Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan	28	Presentase Desa Mandiri

						dan partisipasi masyarakat desa	
					16	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak	29 30 Indeks Pemberdayaan Gender Kategori Kabupaten Layak Anak
V	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;	5	Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan	17	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	31 Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan
VI	Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.	6	Peningkatan Pariwisata Daerah.	<i>Tourism Intensity Index</i>	18	Meningkatkan industry kepariwisataan	32 33 34 35 Rata-rata lama tinggal Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah wisatawan nusantara <i>Spending of Money</i>
					19	Meningkatkan kelestarian seni dan cagar budaya	36 Persentase cagar budaya yang lestari

Sumber : data diolah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



2.1.4. Strategi dan Arah kebijakan

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan proses *consecutive* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD, *scoring*, analisis *balanced scorecard*. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.1.4.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.



Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. *Strenght* (Kekuatan)

STRENGHT (KEKUATAN)
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat;
2. Presentase rumah tinggal bersanitasi meningkat;
3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk meningkat;
4. Presentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik meningkat;
5. Presentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah meningkat;
6. Presenatse kejadian bencana yang dapat ditangani meningkat;
7. Capaian kinerja urusan ketahanan pangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketahanan pangan meningkat;
8. Capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM meningkat;
9. Capaian kinerja urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Meningkat;
10. Capaian kinerja urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Meningkat;
11. Capaian Indikator Utama urusan Perikanan meningkat;
12. Realisasi indikator kinerja urusan Perikanan meningkat;
13. Capaian kinerja urusan energy dan sumber daya mineral berdasarkan kontribusi sektor Ketenagalistrikan meningkat;



14. Cakupan bina kelompok pengrajin meningkat;
15. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) meningkat;
16. Capaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rasio elektrifikasi meningkat;
17. IPM kabupaten Kotawaringin Barat meningkat;
18. PDRB harga konstan, harga berlaku dan perkapita meningkat;
19. Angka partisipasi Murni dan Kasar meningkat;
20. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat.



Tabel 2.3. Weakness (Kelemahan)

WEAKNESS (KELEMAHAN)	
1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Keuangan Daerah.	36. Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditi kelapa sawit rakyat
2. Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.	37. Belum tersedianya informasi pasar produk perkebunan
3. Nilai akuntabilitas kinerja masih rendah	38. Masih rendahnya SDM petani dalam penguasaan teknologi budidaya perkebunan
4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan e-government.	39. Kurangnya budidaya jenis ikan lokal seperti Haruan, Papuyu, Baung dll.
5. belum tersedianya data, informasi sektoral untuk menunjang pemerintahan yang bersih dan efektif dan transparan	40. Kurangnya teknologi pengolahan hasil perikanan
6. Belum optimalnya pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil karena terbatasnya SDM, sarana dan prasarana	41. Kurang terwujudnya pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan
7. Belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah.	42. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tidak optimal
8. Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah	43. Kemampuan kelompok tani masih rendah
9. Penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata belum terwujud sepenuhnya.	44. Rendahnya peran serta Badan Pengawas Koperasi.
10. Sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).	45. Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM
11. Belum semua sekolah yang berada di pedesaan dilengkapi dengan Rumah Dinas Guru.	46. Penggalan pendapatan asli daerah belum didasarkan pada data potensi daerah.
12. Belum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan standar.	47. Pengelolaan pendapatan belum berbasis teknologi informasi.
13. Belum semua puskesmas terakreditasi.	48. Belum adanya tatakelola pembinaan dan pengawasan BUMD
14. Belum terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sesuai standar.	49. Target PAD selama 4 th tidak tercapai
15. Sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Rumah Sakit Sultan Imanuddin belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional.	50. Belum semua desa terhubung akses jalan darat.
16. Kurangnya pengawasan perlindungan lahan pertanian	51. Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik.
17. Belum adanya pemetaan ulang terhadap alih fungsi lahan pertanian	52. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota.
18. minimnya pengeolaan agribisnis usaha pertanian	53. Belum semua masyarakat terlayani air bersih.
19. Rendahnya paranserta Kelompok Pengawas Masyarakat.	54. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat
20. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya.	55. Kurangnya Informasi tentang penataan ruang
21. Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai	56. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman.
22. Belum optimalnya pembinaan dan sinkronisasi kegiatan kepemudaan	57. Masih tingginya angka backlog
23. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olah raga dan atlet berprestasi	58. Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB
24. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik pemerintah	59. Kurangnya penguasaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan.
25. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi serta bahasa daerah	60. Masih belum optimalnya koordinasi pengelolaan pertanian.
26. Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten.	61. Belum tersedia angkutan dalam kota.
27. Belum berkembangnya industri kecil/ industri rumah tangga.	62. Belum terkelolanya angkutan umum ke Ibukota Kecamatan.
28. Belum berkembangnya sektor industri hilir.	63. Ketersediaan area parkir belum memadai
29. Keterbatasan dukungan infrastruktur	64. Study perencanaan perhubungan belum lengkap
30. Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang.	65. Masih rendahnya kewaspadaan menghadapi ancaman bencana.
31. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional.	66. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup.
32. Belum optimalnya peran daerah dalam perlindungan dunia usaha	67. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan.
33. Masih rendahnya cakupan pelayanan irigasi.	68. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau perkotaan.
34. Kurangnya pemahaman petani tentang pentingnya penggunaan benih/ bibit yang unggul	69. Kurang tersedianya data dan informasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup
35. Belum tersedianya peta dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan perkebunan	70. Kurangnya sosialisasi desa siaga bencana
	71. Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.
	72. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Kotawaringin Barat.
	73. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata.
	74. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata.
	75. Belum berkembangnya ekonomi kreatif berbasis pariwisata.



Tabel 2.4. Opportunity (Peluang)

OPPORTUNITY (PELUANG)	
1.	Jumlah penduduk produktif meningkat
2.	Masih banyaknya lahan tidur (belum dimanfaatkan)
3.	Masuk Kawasan Strategis Nasional Pariwisata
4.	Potensi Ekowisata Besar
5.	Produktivitas Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat Meningkat
6.	Potensi Komoditas Kelapa Sawit dan Karet Baik
7.	Potensi Komoditas Ayam Buras, Udang Putih dan Ikan Lais Baik
8.	Sektor pertanian dan Industri Pengolahan menguat

Tabel 2.5. Threat (Ancaman)

THREAT (ANCAMAN)	
1.	Masih adanya anak putus sekolah.
2.	APK PAUD rendah (rata2 30,03%)
3.	Rata2 lama sekolah rendah (8,05 th)
4.	Masih kurangnya minat baca masyarakat.
5.	Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir.
6.	Masih adanya balita gizi buruk.
7.	Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal
8.	Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global
9.	Masih tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok
10.	Pengembangan kawasan pertanian terkendala oleh status kawasan hutan.
11.	Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP).
12.	Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian (Alsintan)
13.	Ancaman penyakit reproduksi dan penyakit menular ternak cukup tinggi
14.	Basis populasi induk (akseptor) masih rendah;
15.	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian
16.	Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)
17.	Ketergantungan produk hortikultura dari luar daerah
18.	Hasil Produksi Tanaman Pangan belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, sehingga mempengaruhi kondisi ketahanan pangan daerah
19.	Masih banyak kelompok yang belum terdapat/berbadan hukum
20.	Tingginya konsumsi beras perkapita.
21.	Rendahnya konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan.
22.	Rendahnya Keragaman Pangan Masyarakat (Pola Harapan Pangan rendah)
23.	Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha.
24.	Kurangnya peran serta investor dalam pembangunan.
25.	Jumlah penduduk dan rata-rata pertumbuhan penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Meningkat

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:



Tabel 2.6. Strategi SWOT

S - O	W - O
<p>Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep <i>Green Economy</i>.</p>	<p>Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan Yang Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-governance) Dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas Antar Ruang Dengan Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dasar Dan Sarana Prasarana Penunjang Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan Antar Daerah.</p>
S - T	W - T
<p>Membangun Generasi Muda Berkualitas Dan Dinamis Melalui Komitmen Afirmasi Terhadap Akses Pendidikan Dan Media Pembelajaran Lainnya Yang Berorientasi Pada Kreatifitas Pengelolaan Potensi Lokal.</p>	<p>Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Pengelolaan Even Kepariwisataaan Dan Penguatan Modal Sosial Yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan Dan Berbudaya.</p>

2.1.4.2. Strategi Arah kebijakan

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Gambar berikut ini adalah strategi pelaksanaan arah kebijakan:

Tabel 2.7. Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	Tahun 2017/2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Sasaran: S.1.T.1 S.2.T.1 S.3.T.1 S.4.T.1	Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan Yang Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-governance) Dan Reformasi Birokrasi;				
Sasaran: S.5.T.2 S.6.T.2 S.7.T.2 S.12.T.4 S.13.T.4 S.14.T.4 S.15.T.5 S.16.T.5 S.17.T.5 S.18.T.6	Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal;				
Sasaran: S.10.T3	Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Pengelolaan Even Kepariwisata Dan Penguatan Modal Sosial Yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan Dan Berbudaya;				
Sasaran: S.8.T.3 S.9.T.3 S.11.T.3	Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas Antar Ruang Dengan Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dasar Dan Sarana Prasarana Penunjang Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan Antar Daerah;				
	Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep Green Economy;				

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana berikut :

Tabel 2.8. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Barat

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini atas audit BPK	
	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	
		Indeks Profesionalitas Aparatur	
		Maturitas SPIP	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks E-Gov (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/ SPBE)	
		Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang benar dan tepat waktu		
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	
		Rata-Rata Lama Sekolah	
		Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	
		Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi di tingkat :	pusat
			regional provinsi
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	



	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah
	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten
	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk
	Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
Indeks Tutupan Hutan		
Indeks Resiko Bencana		
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)
	Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri
	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak	Indeks Pemberdayaan Gender
Kategori Kabupaten Layak Anak		
Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan
Peningkatan Pariwisata Daerah	Meningkatkan industri kepariwisataan	Rata-rata lama tinggal
		Jumlah wisatawan mancanegara
		Jumlah wisatawan nusantara
		Spending of money
	Meningkatkan kelestarian seni dan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang lestari

Sumber: Data yang diolah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari



kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 ada pada Lampiran.

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.



Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini Atas Audit BPK	skor	WTP
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	skor	B
	Indeks Profesional Aparatur	%	77
	Maturitas SPIP	Level	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government	Indeks	1,89
	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik	Skor	87
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	%	70
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Thn	12,80
	Rata-Rata lama sekolah	Thn	8,43
	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	134.76
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Thn	70,21
	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	60
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga.	Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi	%	29
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5,80
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,50

	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	%	6,30
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,9
Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	%	2,16
	Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	%	11,81
Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.	Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten	%	83,10
Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor-Sektor Strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	%	17
Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber-Sumber Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,93
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana.	Indeks Kualitas Air	%	53
	Indeks Kualitas Udara	%	60
	Indeks Tutupan Hutan	%	59
	Indeks Resiko Bencana	%	108
Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	%	0,65
Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	%	5
Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	%	94,01
	Kategori Kabupaten Layak Anak	%	Pratama (501-600)

Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum.	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya	%	20
Meningkatnya Industri Kepariwisata.	Rata-rata Lama Tinggal	hari	2
	Jumlah Wisatawan Mancanegara	orang	15.000
	Jumlah Wisatawan Nusantara	orang	90.000
	Spending of Money	Milyar	86
Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya	Persentase cagar Budaya yang Lestari	%	24

Sumber: Data yang diolah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

- Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.305.378.050.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 ini merupakan akuntabilitas kinerja yang berbentuk laporan dalam rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan diukur atas dasar penilaian terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator pencapaian tujuan dan sasaran strategis selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan dalam LKjIP 2018 ditunjukkan dari capaian indikator kerjanya.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengemban amanah masyarakat, berkewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka menginterpretasikan atas pencapaian dan indikator kinerja sasaran digunakan skala dalam empat kategori sebagai berikut:



Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d 75 %	Cukup Baik (C)
4	Kurang 55 %	Kurang (K)

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa implementasi RPJMD/IKU Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah mencakup pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan. Ketiganya dilaksanakan dalam rangka pencapaian realisasi sasaran strategis.

Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 19 (sembilan belas) Sasaran dan 36 (tiga puluh enam) Indikator Sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja. Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja. Misi III terdapat 1 tujuan 6 sasaran dan 13 indikator kinerja. Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja. Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja. Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja.

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka capaian

sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja;
- Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 6 sasaran dan 13 indikator kinerja;
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja;
- Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja.
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja.

(19 sasaran strategis dan 36 Indikator Kinerja Utama).

Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1	Misi 1	1	4	7	BS =1, B =6, C = -, K =-
2	Misi 2	1	3	6	BS =2, B =3, C = 1, K =-
3	Misi 3	1	6	13	BS =9, B =3, C = -, K =1
4	Misi 4	1	3	4	BS =1, B =-, C = 1, K =2
5	Misi 5	1	1	1	BS =-, B =1, C = -, K =-
6	Misi 6	1	2	5	BS =5, B =-, C = -, K =-
	Jumlah	6	19	36	BS =18, B =13, C = 2, K =3

Sumber: Data yang diolah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



Dari 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

Tabel 3.3. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi I (7 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	1	14,29
2	Baik	6	85,71
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
	Jumlah	7	100,00
Misi II (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	2	33.33
2	Baik	3	50.00
3	Cukup	1	16.67
4	Kurang	0	0.00
	Jumlah	6	100,00
Misi III (13 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	9	69.23
2	Baik	3	23.08
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	1	7.69
	Jumlah	13	100,00
Misi IV (4 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	1	25.00
2	Baik	0	0.00
3	Cukup	1	25.00
4	Kurang	2	50.00
	Jumlah	4	100,00



Misi V (1 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	0	0.00
2	Baik	1	100.00
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	0	0.00
	Jumlah	1	100,00
Misi VI (5 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	5	100.00
2	Baik	0	0.00
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	0	0.00
	Jumlah	5	100,00

Sumber: Data yang diolah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, diketahui bahwa 18 indikator sasaran atau 50 % Baik Sekali, 13 indikator sasaran atau 36,11 % Baik, dan 2 indikator sasaran atau 5,56 % Cukup Baik, dan 3 indikator sasaran atau 8,33 % Kurang. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 126,9 % atau bermakna Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 Baik. Capaian kinerja tahun 2018 mencapai 126,90 % mengalami kenaikan 30,21 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 yang mencapai 96,69 %.



3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Analisis Pencapaian Sasaran 1.1

Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Opini Atas Audit BPK	skor	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100				100

Sumber: Data diolah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel diatas diketahui bahwa indikator sasaran **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Bersih dan Transparan** mencapai target. Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100% sama dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100%, dengan dikategorikan Baik.

Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diperoleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual, penyajian laporan keuangan terdiri atas :

1. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
2. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pada penyusunan laporan tersebut, masih dijumpai potensi permasalahan, yaitu :

1. Belum seluruhnya PPK-SKPD memahami dengan baik konsep akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
2. Permasalahan aset yang memerlukan penanganan secara lebih cermat antara lain :
 - a. Persoalan penyerahan aset kepada SKPD pengguna
 - b. Penanganan aset perolehan hibah yang tidak melalui mekanisme APBD
3. Belum sinkronnya kode rekening penyusunan anggaran, kode rekening barang milik daerah, dan kode rekening penyusunan laporan keuangan
4. Perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi dengan memasukkan hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi.

Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual antara lain :



1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual;
2. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrual;
3. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat
4. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat

Tabel 3.5. Analisis Pencapaian Sasaran 1.2
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP Kabupaten	skor	CC	CC	100,00	B	CC	92,48
2	Indeks Profesional Aparatur	%	N/A	N/A	N/A	77	64,97	84,37
3	Maturitas SPIP	Level	2	2	100,00	3	3	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			92,28

Sumber: Data diolah oleh Sekretariat Daerah, BKPP dan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel di atas diketahui bahwa 3 indikator sasaran **Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**, 1 indikator mencapai target dan 2 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 92,28% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100%, tetapi masih dikategorikan Baik.



- Nilai SAKIP, nilai realisasi capaian diperoleh dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Tahun 2018 oleh Kementerian PAN dan RB, Nilai Sakip tidak mencapai Target dikarenakan :

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih terfokus kepada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output dan belum memberikan *outcome* yang nyata kepada masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah belum menyusun perencanaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah.
3. Perjanjian Kinerja belum dilengkapi dengan rencana aksi.
4. Tidak terbentuknya sistem monitoring yang konsisten dan berkala untuk menjamin tercapainya target-target yang dirumuskan.
5. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang diharapkan, karena masih sebatas kepada penyampaian hasil kegiatan dan penyerapan anggaran.
6. Sistem evaluasi masih terbatas kepada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, dan belum menyentuh kepada evaluasi kemanfaatan hasil kegiatan (*outcome*).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

1. Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pimpinan Daerah dan Kepala OPD untuk mewujudkan SAKIP yang prima.
2. Penguatan kapasitas dan kesungguhan Kepala OPD untuk memahami serta melakukan kegiatan yang sejalan dengan Target dan Sasaran Pemerintah Daerah.



3. Pembentukan dan penguatan solitaritas fasilitasi SAKIP yang terdiri dari unsur perencanaan tiap-tiap OPD.
 4. Penguatan peran Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi untuk mengawal jalannya SAKIP yang didampingi oleh Kementerian PAN-RB terutama dalam proses penyusunan Indikator Kinerja.
 5. Membangun sistem monitoring berbasis online (SAKIP Online).
 6. Membentuk Tim Monev yang secara berkala melakukan *Roadshow* ke tiap-tiap OPD untuk memonitoring dan melakukan pendampingan terkait SAKIP
- Indeks Profesionalitas ASN, nilai realisasi capaian diperoleh dari :

$$\text{Indeks Profesionalitas ASN} = \frac{\text{Jumlah total bobot skor ASN tiap OPD}}{\text{Jumlah total Pejabat Struktural}}$$

$$\text{Bobot skor (per orang)} = \frac{100}{\text{Bobot Sub dimensi}} \times 100$$

Indeks Profesionalitas ASN tidak mencapai target dikarenakan :

1. Masih banyak PNS yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan/ seminar/ workshop sesuai bidang tugasnya.
2. Tidak tersedianya dana untuk PNS yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan / seminar / workshop sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN, PNS yang telah menduduki jabatan struktural harus segera mengikuti diklat kepemimpinan.
2. Pejabat struktural yang belum memiliki pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) agar segera meningkatkan jenjang pendidikan sesuai bidang tugasnya.



- Tingkat Maturitas SPIP, nilai realisasi capaian diperoleh dari laporan hasil *Quality Assurance* (QA) atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP, Tingkat Maturitas SPIP mencapai target dikarenakan :
 1. Hasil *Quality Assurance* (QA) menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.
 2. Hasil QA atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi)

Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Sasaran 1.3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government	Indeks	1,89	1,89	100	1,89	1,89	100
2	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik	Skor	85	75	88,23	87	82,74	95,10
Rata-Rata Capaian Kinerja					94,11			97,55

Sumber: Data diolah oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel di atas diketahui bahwa 3 indikator sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi**”, 1 indikator mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaian



kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 97,55 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 94,11%, dikategorikan Baik.

- Indeks E-Gov (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/ SPBE), nilai realisasi capaian diperoleh dari Evaluasi Mandiri oleh Tim Internal SPBE kabupaten kotawaringin Barat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Eksternal Kementerian PAN dan RB melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2018, dalam Evaluasi SPBE untuk memperoleh indek SPBE dilakukan penilaian atas 3 Domain 7 aspek dan 35 indikator, Indeks E-Gov mencapai target dikarenakan :

1. Domain Kebijakan

Dalam domain kebijakan, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Telah membentuk Tim Percepatan Implementasi TIK dan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 152 Tahun 2017 sebagai Tim Pengarah TIK kabupaten.
- b. Menyusun draft / Konsep Perda dan Perbub implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memuat rencana induk, perencanaan dan penganggaran TIK serta pengorganisasian TIK.
- c. Menyusun draft / Konsep Perbub implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik.
- d. Telah tersedianya SK Tim pengelola JDIH sebagai kebijakan internal sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).



2. Domain Tata Kelola SPBE

- a. Penyusunan Rencana Induk TIK / e-Government yang memuat arsitektur infrastruktur, aplikasi, SDM, Perencanaan dan penganggaran TIK.
- b. Melaksanakan integrasi system pada aplikasi JDIH, presensi dan e-kinerja, implementasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan.
- c. Implementasi aplikasi berbagi pakai seperti SAPA kemendagri, SIPPID dan Simaya serta replikasi aplikasi dari beberapa daerah.

3. Layanan SPBE (sistem yang dimiliki)

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat telah menginisiasi aplikasi-aplikasi untuk layanan persuratan (SIMAYA), Aplikasi layanan aspirasi (SAPA), Layanan Informasi dan dokumentasi (SI PPID), aplikasi manajemen kepegawaian (e-kinerja/SIMK).

4. Beberapa kebijakan dan aplikasi yang masuk dalam penilaian indikator SPBE juga telah ada (existing) di SKPD –SKPD pada tahun-tahun sebelumnya.

- Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik, nilai realisasi capaian diperoleh dari survey indeks kepuasan masyarakat terhadap 8 SKPD/ Instansi Pemerintah/ Unit Pelayanan. Unit Pelayanan dimaksud antara lain adalah Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Survey dilaksanakan oleh masing-masing



SKPD/ Instansi Pemerintah/ Unit Pelayanan dengan rincian variabel penilaian sebagai berikut :

1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan dengan capaian
2. Kemudahan prosedur pelayanan dengan capaian
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
6. Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan
7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Berikut penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di unit penyelenggaran pelayanan umum Kabupaten Kotawaringin Barat :



No	Perangkat Daerah	Nilai SKM	Kinerja Unit Pelayanan	Unsur Penilaian			
				Nama Unsur tertinggi	Nilai	Nama Unsur terendah	Nilai
1	Kecamatan Kumai	86.58	Baik	Biaya/Tarif	100	Waktu Pelayanan	78
2	Kecamatan Pangkalan Banteng	79.25	Baik	Biaya/Tarif	99.25	Maklumat Pelayanan	75.25
3	Kecamatan Pangkalan Lada	88.52	Sangat Baik	Biaya/Tarif	100	kompetensi pelaksana	85
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73.67	Kurang	Perilaku Pelaksana	81.5	Waktu Pelayanan	68.33
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91.81	Sangat Baik	Penanganan Pengaduan	95.25	Waktu Pelayanan	87
6	RSUD Sultan Imanuddin	75.35	Kurang	Biaya/Tarif	67.24	Sarana / Prasarana	83.22
7	Badan Pendapatan Daerah	81.09	Baik	Perilaku Pelaksana	76.25	Penanganan Pengaduan	85
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85.68	Baik	Biaya/Tarif	74.35	Produk Pelayanan	98.06
TOTAL		82.74	Baik				

Sumber : Diolah oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Target rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dengan skor 87 dengan realisasi skor 82,74. Sehingga dari hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah sebesar 95%. Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik, tidak mencapai target dikarenakan :

1. Sebagian besar unit pelayanan telah memenuhi aspek pelayanan publik (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan SKM), aspek pelayanan publik tersebut telah dilaksanakan namun belum ditetapkan dan dipublikasikan secara berkelanjutan.

2. Profesionalisme SDM secara umum telah memadai namun masih terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi diantaranya penetapan kode etik yang merupakan pedoman dalam melaksanakan pelayanan.
3. Sarana dan prasarana secara umum telah memadai namun masih perlu untuk dilakukan penyempurnaan dan peremajaan serta penambahan fasilitas bagi penerima layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas).
4. Belum ada inovasi yang dibuat.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

1. Mendorong Unit Pelayanan untuk dapat membuat dan menetapkan Standar Pelayanan sesuai dengan jenis layanan serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014. Maklumat Pelayanan dan survey kepuasan masyarakat juga telah disarankan untuk dipublikasikan melalui ruang pelayanan dan website secara berkelanjutan.
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai sehingga disarankan kepada Unit Pelayanan agar dapat melakukan training/ diklat secara rutin bagi pegawainya.
3. Mendorong Unit Pelayanan untuk membuat dan menetapkan kode etik pegawai dengan melengkapi aturan tentang reward dan punishment.
4. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, disarankan agar dapat dilakukan penyempurnaan dan peremajaan sarana dan prasarana penunjang layanan serta penambahan fasilitas bagi penerima layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas).
5. Informasi mengenai konsultasi dan pengaduan disarankan agar dapat didokumentasikan dan dipublikasikan serta terintegrasi dengan SP4N LAPOR.



6. Mendorong Unit Pelayanan untuk berinovasi guna mempermudah pemberian layanan.

**Tabel 3.7. Analisis Pencapaian Sasaran 1.4
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	%	65	66	101,53	70	71,88	102,68
Rata-Rata Capaian Kinerja					101,53			102,68

Sumber: Sekretariat Daerah dan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator sasaran “**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**” mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 102,68 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 101,53%, dikategorikan Baik Sekali. Nilai realisasi capaian diperoleh dari :

- Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu, hingga tahun 2018, hasil penilaian dan pemantauan menunjukkan terdapat 23 desa dari 32 desa atau sebesar 71,88% yang menjadi sample telah melaksanakan tata kelola pemerintahan desa dengan baik. Realisasi kinerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yakni 70%, mencapai target dikarenakan :

1. Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (pemerintah desa dan BPD). Hal tersebut bertujuan agar aparatur pemerintah desa tidak hanya mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, akan tetapi juga diharapkan mampu untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif.
2. Beberapa desa telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informatika agar informasi dan pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Kegiatan musrenbang yang dimulai dari tingkat desa, telah dilaksanakan dengan baik oleh sebagian besar desa.
4. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa juga terbukti efektif untuk menindak penyalahgunaan keuangan desa yakni terlihat dengan terlapornya sejumlah kepala desa sehingga diproses secara hukum.
5. Sikap kritis dan keaktifan masyarakat dalam pengawasan semakin terlihat meningkat dilihat dari jumlah kasus terlapor. Hal ini juga dipandang sebagai bagian capaian dari keterbukaan informasi keuangan desa.



**Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Sasaran 2.1
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Thn	12,61	12,42	98,49	12,80	12,69	99,14
2	Rata-Rata lama sekolah	Thn	8,24	8,05	97,69	8,43	8,35	99,05
3	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	28.000	124.582	444,93	134.760	133.831	99,31
Rata-Rata Capaian Kinerja					213,70			99,16

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel di atas diketahui bahwa 3 indikator sasaran **“Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat”** tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 99,16 % mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 213,70 akan tetapi tetap dikategorikan Baik. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama sekolah, nilai realisasi capaian diperoleh dari publikasi data Kotawaringin Barat dalam Angka oleh Badan Pusat Statistik.

- Angka Harapan Lama Sekolah, mencapai tidak target dikarenakan :
 1. Belum maksimalnya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Pendidikan Sekolah Dasar, Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terutama peningkatan sarana maupun prasarana dan fasilitas sekolah dengan Standarisasi Pelayanan Minimal (SPM).



2. Kurangnya sarana dan prasarana meliputi pembangunan ruang kelas, kantor guru, perpustakaan, Lab IPA, Rumah Dinas Guru dll.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

1. Standarisasi Pelayanan Minimal (SPM) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Pendidikan Sekolah Dasar, Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pendidik
- Rata-Rata lama sekolah, mencapai tidak target dikarenakan :
1. Belum maksimalnya program Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan) yaitu peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik) dan belum maksimalnya Bantuan Sosial Pendidikan atau Beasiswa bagi Siswa Berprestasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

1. peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik) dengan melakukan Sosialisasi, Pelatihan-pelatihan atau Bimbingan Teknis
 2. memberikan lebih banyak kesempatan Bantuan Sosial Pendidikan atau Beasiswa bagi Siswa Berprestasi.
- Jumlah pengunjung perpustakaan, tidak mencapai target dikarenakan :
1. Sarana dan prasarana sebagian besar perpustakaan di Kotawaringin Barat belum memenuhi standar nasional.
 2. Respon dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi perpustakaan masih rendah.
 3. Belum terpenuhinya koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan masyarakat.



4. Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan Daerah, perpustakaan Desa/Kel, Sekolah dan TBM.
5. Perpustakaan belum terbentuk disemua Kecamatan dan Desa/Kel.
6. Kurang lancarnya penggunaan jaringan IT di Perpustakaan Daerah karena keterbatasan kapasitas jaringan internet.
7. Belum maksimalnya peran perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Perpustakaan daerah belum memenuhi standar nasional kebutuhan pustakawan.
9. Kurang terjangkau nya semua Desa/Kel untuk layanan Perpustakaan Keliling.
10. Belum ada regulasi tentang perpustakaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana melalui sumber dana APBN/APBD/APBDes juga melakukan advokasi kepada pihak BUMN/D, pelaku usaha, dan perorangan untuk membantu melengkapi sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan serta memelihara dan memperbaiki sarana, prasarana dan fasilitas yang ada.
2. Melakukan sosialisasi peraturan perpustakaan tentang fungsi perpustakaan kepada masyarakat baik dilaksanakan sendiri maupun bersinergi dengan pihak lain.
3. Mendorong pemenuhan koleksi melalui sumber dana APBN/APBD/APBDes serta kepedulian BUMN/D, pelaku usaha dan perorangan melalui Gerakan Hibah Buku.
4. Mendorong pengangkatan tenaga pengelola baik dari ASN maupun tenaga kontrak.



5. Mendorong kepada pengambil kebijakan/stakeholder agar mewajibkan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kel untuk membentuk perpustakaan (tindak lanjut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Permendes Nomor 16 Tahun 2018)
6. Mendorong untuk melakukan peningkatan kapasitas jaringan internet.
7. Melakukan/menyelenggarakan berbagai kegiatan yang variatif dalam rangka upaya mensejahterakan masyarakat.
8. Penambahan tenaga pustakawan pada Perpustakaan Daerah dengan mengusulkan formasi pustakawan.
9. Penambahan armada untuk layanan perpustakaan keliling.
10. Menetapkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, surat edaran tentang perpustakaan

**Tabel 3.9. Analisis Pencapaian Sasaran 2.2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Hidup	Thn	70,40	70,21	99,73	70,59	71,34	101,06
2	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	60	60	100	60	70	116,66
Rata-Rata Capaian Kinerja					99,86			108,86

Sumber: Data diolah oleh Badan Pusat Statistik, RSUD Sultan Imanuddin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel di atas diketahui bahwa 2 indikator sasaran “**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**” 2 indikator mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 108,86 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 99,86%, dikategorikan Baik Sekali..



- Angka Harapan Hidup, nilai realisasi capaian diperoleh dari publikasi BPS tentang Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2018. Angka Harapan Hidup mencapai target dikarenakan :
 1. Tercapainya Pelayanan kesehatan penduduk miskin yang dilayani di fasilitas Kesehatan 100 %.
 2. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2018 mencapai 6/1000 Kelahiran Hidup dari yang ditargetkan sebanyak 24/1000 Kelahiran Hidup.
 3. Prevalensi Stunting pada balita tahun 2018 sebesar 7,41% dari yang ditargetkan 27%.
 4. Desa Siaga Aktif secara struktur dan aktivitas pada tahun 2018 mencapai 85% dari yang ditargetkan sebesar 85%.
 5. Cakupan Kelurahan/Desa KLB yang ditangani < 24 Jam pada tahun 2018 mencapai 100 %..
 6. Ketersediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada tahun 2018 mencapai 100%.
- Layanan kesehatan yang terakreditasi, nilai realisasi capaian diperoleh dari hasil Survey Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), hasil penilaian 15 kelompok kerja mendapatkan nilai 80%. Pada Tahun 2018 dilakukan Survey verifikasi ulang oleh KARS dengan hasil masih mempertahankan status terakreditasi paripurna (bintang 5), layanan kesehatan yang terakreditasi mencapai target dikarenakan :
 1. Komitmen Rumah Sakit dengan seluruh jajaran mulai Direktur sampai tingkat bawah di unit pelayanan untuk melaksanakan dan memenuhi standar pelayanan rumah sakit kepada pasien dan masyarakat.
 2. Dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi standar pelayanan rumah sakit dari sisi SDM dan sarana prasarana.

- Dukungan masyarakat/pasien sebagai pengguna pelayanan untuk berpartisipasi dalam mematuhi semua standar dan prosedur pelayanan di Rumah Sakit.

**Tabel 3.10. Analisis Pencapaian Sasaran 2.3
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga.**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi	%	1	1	100	29	16	55,17
Rata-Rata Capaian Kinerja								55,17

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator sasaran “**Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga**” tidak mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 55,17% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100%, dikategorikan Cukup Baik.

- Persentase Peningkatan Peraih Prestasi Pemuda, tidak mencapai target dikarenakan :
 - Karena kurangnya Pembinaan pada Cabang - Cabang Olahraga yang ada
 - Karena kurangnya minat masyarakat berolahraga
 - Karena ada beberapa Atlet pindah ke Daerah lain
 - Karena kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

- Harus melakukan Pembinaan pada setiap Cabang - Cabang Olahraga yang ditargetkan juara



2. Pemerintah Daerah agar menggelorakan Olahraga
3. Pemerintah Daerah mencari Lapangan Kerja bagi Atlet kita
4. Agar dapat menyiapkan Sarana dan Prasarana

Tabel 3.11. Analisis Pencapaian Sasaran 3.1

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Sekunder Unggulan.

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	9,01	5,23	58,04	5,50	9,01	163,81
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,96	6,96	116,77	7,30	5,96	81,64
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	%	7,73	5,73	74,12	6,30	7,73	122,69
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	N/A	97,30	97,30	92,90	96,8	104,19
Rata-Rata Capaian Kinerja					86,55			118,08

Sumber: Data diolah oleh BPS, Disperindagkopdan UKM, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Perikanan Kabupaten.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran “**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Sekunder Unggulan**” 3 mencapai target dan 1 tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 118,08% mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 86,55%, dikategorikan Baik Sekali. Nilai realisasi capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan diperoleh dari publikasi data Kotawaringin Barat dalam Angka oleh Badan Pusat Statistik.



- Industri pengolahan terbesar di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) atau CPO. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri, mencapai target dikarenakan :

1. Tingginya permintaan CPO baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Tinggi nya permintaan pasar mengakibatkan kenaikan produksi CPO.
3. Harga CPO sedang mengalami tren kenaikan.

- Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, tidak mencapai target dikarenakan :

1. Produksi barang dalam daerah meningkat khusus nya sektor pertanian.
2. Muncul nya produsen-produsen baru sehingga mengurangi ketergantungan perdagangan dengan luar Kalimantan.
3. Pendek nya *Supply Chain* barang karena tumbuhnya produsen barang di daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan untuk terus meningkatkan produksi barang dalam daerah khususnya UMKM
2. Melakukan survey ke pasar luar daerah dan membantu mendistribusikan barang
3. Melakukan pendampingan dalam pemasaran produk

- Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, mencapai target dikarenakan :

1. PDRB Sektor Pertanian :
 - a. Meningkatnya produksi tanaman pangan dengan pengembangan komoditas unggulan dan potensial
 - b. Perlindungan tanaman pangan dari hama dan penyakit



- c. Pengembangan bibit/benih yang tangguh, tahan penyakit dan unggul
 - d. Pengelolaan pemasaran dan pengolahan hasil pasca panen
2. PDRB Sektor Perkebunan :
- a. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan pada tingkat petani
 - b. Ketersediaan informasi pasar harga buah terutama sawit dan karet
 - c. Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas potensial.
3. PDRB Sektor Perikanan :
- a. Penambahan armada kapal < 5 gt sejumlah 21 unit, > 5 gt sejumlah 3 dan >10-15 gt sejumlah 5 unit
 - b. Penambahan alat tangkap ikan sehingga menambah jumlah tangkapan ikan dan kondisi alam tidak ada kemarau panjang

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH), nilai realisasi capaian diperoleh dari :

Skor PPH = Prosentase (%) AKG X Bobot masing-masing kelompok pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH), mencapai target dikarenakan :

1. Masing-masing program tersebut ditindaklanjuti dengan rencana aksi untuk mendukung capaian skor PPH melalui kegiatan-kegiatan yaitu
 - a. Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (LCM B2SA) yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK, dimana PKK merupakan ujung tombak pembinaan dan pengembangan keluarga. Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat sampai pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menerapkan hasil/materi Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan



Aman sehingga mampu memperbaiki skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi;

- b. Kegiatan Sosialisasi Penganekaragaman Pangan, yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), yang diikuti oleh Kelompok Wanita Tani. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan semangat dan antusias Kelompok Wanita Tani dalam mengembangkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga;
- d. Kegiatan Promosi potensi daerah melalui event-event pameran untuk mengenalkan/mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang produk pangan lokal Kabupaten Kotawaringin Barat serta potensi sumber daya pangan lainnya;
- e. Kegiatan Sosialisasi dan promosi keamanan pangan serta sosialisasi pangan lokal kepada anak sekolah SD/MI. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menanamkan sejak dini kepada siswa SD/MI akan pentingnya keamanan pangan dan penganekaragaman pangan;
- f. Kegiatan pasar pangan murah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan stabilitas harga, akses dan pasokan pangan.
- g. Kegiatan penyediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan daerah, antara lain dengan cara secara rutin mendata harga pangan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar harga dan pasokan stabil, pangan dapat diakses seluruh masyarakat dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau.



2. Tersedianya sumber daya pangan dan keberagaman jenis pangan yang memadai di Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan peluang yang besar bagi masyarakat mengkonsumsi pangan yang beragam, seperti :
- Pangan Hewani (ikan sungai, ikan laut, daging ayam, daging sapi)
 - Umbi-umbian (Ubi kayu/singkong, ubi jalar dll)
 - Padi-padian (beras)
 - Buah-buahan (Pisang, rambutan, durian, buah naga dll)
 - Sayur-sayuran (Bayam, Katuk, kacang panjang, seledri, labu, terong dll)
 - Minyak dan Lemak (produk dari tanaman kelapa)

**Tabel 3.12. Analisis Pencapaian Sasaran 3.2
Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	%	N/A	N/A	N/A	2,16	1116,54 %	1116,54
2	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	%	14,21	13,43	94,51	11,81	14,24	120,55
Rata-Rata Capaian Kinerja					94,51			618,55

Sumber: Data diolah oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 sasaran indikator **Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah** melebihi dari target yang telah ditentukan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 618,55 % yang berarti dapat dikategorikan Baik Sekali.



- Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN, nilai realisasi capaian diperoleh dari :

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun	
			Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	PMA	Rupiah	617.289.750.000	1.998.044.125.000
2	PMDN	Rupiah	265.396.300.000	8.739.363.200.000
total			882.686.050.000	10.737.407.325.000

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Realisasi tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN} \\
 \text{Pertumbuhan} & = & \frac{\text{tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100\% \\
 \text{nilai PMDN} & & \\
 & = & \frac{9.854.721.275}{882.686.050.000} \times 100\% \\
 & = & 1116,45 \%
 \end{aligned}$$

Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN, melebihi dari target yang telah ditentukan dikarenakan :

- a. Ada beberapa perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dari PMDN, sehingga meningkatkan persentase PMA dan PMDN hingga 1116,45 %.
- b. Untuk PMA pada tahun 2018 dari segi target tidak terpenuhi, hanya terealisasi 60%

Penyebab antara lain :

- Adanya proses tender yang dibatalkan.

- Adanya pembatalan Izin prinsip
 - Permohonan Izin Usaha Pertambangan operasi produksi masih dalam pembahasan di Kementerian ESDM RI.
 - Adanya masa berlaku Izin perusahaan yang telah berakhir.
- Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah melebihi dari target yang telah ditentukan, nilai realisasi diperoleh dari :

$$\text{Rasio Tahun 2018} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan total}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Tahun 2018} = \frac{179.704.003.066,73}{1.262.233.569.055,92} \times 100\%$$

$$= 14,24 \%$$

Persenta Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah, mencapai target dikarenakan :

1. PAD secara keseluruhan naik, sedangkan komponen pendapatan daerah secara keseluruhan ada yang turun. Bila dilihat secara data, hal tersebut terjadi pada sumbangan pihak ketiga yang terealisasi hanya sekitar 22%, karena Penghentian Sumbangan Pihak Ketiga di Kabupaten sesuai dengan Surat Edaran Gubernur No.525.26/180/Disbun tgl. 21 Maret 2017, dan belum ada titik temu untuk Sumbangan Pihak Ketiga ini. Yang awalnya akan disalurkan ke Provinsi baru ke kabupaten, namun hingga saat ini belum ada realisasi.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah, ada beberapa hal permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Secara umum Perda Retribusi Daerah mengalami revisi untuk menyesuaikan nomenklatur dan perubahan tarif. Revisi Perda Retribusi yang diajukan mengalami



keterlambatan dalam pengesahannya, sementara target yang ditetapkan pada tahun 2018 telah memperhitungkan tarif sesuai Perda yang baru.

2. Perubahan Peraturan oleh Pemerintah Pusat mengakibatkan sulitnya untuk mengembangkan pendapatan retribusi daerah, karena pada dasarnya pemungutan retribusi berkaitan dengan pelayanan dan perijinan (contoh Ijin HO). Selain itu adanya pengalihan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, mengakibatkan potensi retribusi daerah mengalami pengurangan (sektor perikanan dan perhubungan).
 3. Upaya Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru pada Retribusi Parkir Khusus dengan sistem elektronik belum dapat terlaksana pada tahun 2018, karena regulasi dan SOP teknis pemungutan masih dalam proses.
- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, berikut solusi untuk penyelesaian masalah, yaitu :
1. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif untuk mempercepat penyelesaian/pengesahan Perda
 2. Potensi target retribusi yang hilang dapat dikompensasikan dengan menaikkan tarif retribusi lain yang masih berhubungan dengan objek retribusi tersebut (contoh retribusi HO dikompensasikan dengan menaikkan tarif retribusi IMB) melalui mekanisme revisi/perubahan regulasi
 3. Perlu dilakukan percepatan penyelesaian regulasi dan SOP teknis pemungutan Retribusi Parkir Khusus.



**Tabel 3.13. Analisis Pencapaian Sasaran 3.3
Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan
Infrastruktur Ekonomi.**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten	%	77,46	71,44	92,22	83,10	100,00	120,33
Rata-Rata Capaian Kinerja					92,22			120,33

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran indikator **Meningkatnya Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi** melebihi dari target yang telah ditentukan. Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 120,33% yang berarti dapat dikategorikan Baik Sekali.

- Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten, nilai realisasi capaian diperoleh dari terpenuhinya akses jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten memenuhi target dikarenakan :
 1. Fokus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada pengembangan/peningkatan jalan-jalan yang mendukung pusat kegiatan seperti Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin lama melalui pendanaan dari Provinsi Kalimantan Tengah maupun APBD Kotawaringin Barat.
 2. Peningkatan akses jalan menuju Bandara Baru di Sebuai melalui kegiatan pembangunan pada ruas Jalan Kumpai Batu Atas - Batas Pasir Panjang - Sebuai Barat.

3. Peningkatan konektivitas dalam sistem jaringan jalan guna mendukung pusat-pusat kegiatan lainnya seperti rencana KEK Sebuai, pelabuhan, bandara Iskandar, dan pengembangan kawasan perkebunan, kawasan strategis ekonomi serta sentra produksi yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui kegiatan Pembangunan Jalan, Peningkatan Jalan, Pembangunan Jembatan.
4. Adanya dukungan dari beberapa pihak swasta (perusahaan sawit) di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna mendukung pembukaan akses jalan menuju daerah-daerah yang belum terhubung.

Tabel 3.14. Analisis Pencapaian Sasaran 3.4

Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor-Sektor Strategis

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	%	18,50	15,21	101,90	17	13,03	130,46
Rata-Rata Capaian Kinerja					101,90			130,46

Sumber: Data diolah oleh Dinas Sosial

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk** melebihi dari target yang telah ditentukan. Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 130,46 % mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 101,90 %, dikategorikan Baik Sekali.

- Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk, nilai realisasi capaian diperoleh dari :

$$\text{Persentase penurunan PMKS} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase penurunan PMKS} &= \frac{38.491}{295.349} \times 100\% \\ &= 13,03\% \end{aligned}$$

Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk, mencapai target dikarenakan :

1. Jumlah penduduk yang meningkat sebesar 295.349 Jiwa berbanding dengan jumlah Fakir Miskin sebesar 38.491 Jiwa (berdasar data Badan Data Terpadu / BDT Pusdatin Kemensos RI) ditambah jumlah PMKS sasaran pelayanan sebesar 1.026 Jiwa. Dimana seluruh pelayanan dan pemberian bantuan sosial di tahun 2018 telah di fokuskan atau diutamakan yang telah masuk kedalam data BDT tersebut, tidak seperti ditahun-tahun sebelumnya yang hanya berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat langsung yang masuk ke Dinas Sosial, pada kenyataanya usulan dari masyarakat lebih kepada unsur kedekatan sehingga bantuan tidak tepat sasaran.

Tabel 3.15. Analisis Pencapaian Sasaran 3.5

Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber-Sumber Ekonomi

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,04	3,25	93,53	2,93	2,17	135,02
Rata-Rata Capaian Kinerja								135,02

Sumber: Data diolah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator sasaran **Tingkat Pengangguran Terbuka** melebihi dari target yang telah ditentukan. Capaian kinerja sasaran pada 2018



adalah sebesar 135,02 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 93,53% dikategorikan Baik Sekali.

- Tingkat pengangguran terbuka, nilai realisasi capaian diperoleh dari :

$$\text{Tingkat pengangguran terbuka} = \frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pengangguran terbuka} = \frac{3.213}{148.404} \times 100\%$$

$$= 2,17 \%$$

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dikarenakan :

1. Terbukanya informasi lowongan kerja dari Perusahaan/Lembaga/BUMN.
2. Penempatan tenaga kerja di Perusahaan/Lembaga/BUMN.
3. Terlaksananya pelatihan TTG (Penganggur dan setengah penganggur) di Pedesaan.
4. Terlaksananya Pelatihan - Pelatihan (Processing, Menjahit, Instalasi Listrik, Bengkel Sepeda Motor, Komputer, dan Las) dalam peningkatan kompetensi bagi Pencari Kerja (Penganggur dan setengah penganggur) di Kotawaringin Barat.



**Tabel 3.16. Analisis Pencapaian Sasaran 3.6
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana.**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air	%	50	62	124	53	50	94,33
2	Indeks Kualitas Udara	%	N/A	93,69	93,69	60	89,42	149,03
3	Indeks Tutupan Hutan	%	56,83	55,69	97,99	59	55,69	94,38
4	Indeks Resiko Bencana	%	115	N/A	N/A	108	N/A	N/A
Rata-Rata Capaian Kinerja					78,92			84,43

Sumber: Data diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel di atas diketahui bahwa 4 indikator sasaran “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana**” 1 indikator mencapai target, 2 indikator tidak mencapai target dan 1 indikator nilai nya tidak tersedia. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 84,43 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 78,92%, dikategorikan Baik.

- Indeks Kualitas Air, nilai realisasi capaian diperoleh dari :

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel yang memenuhi mutu	Prosentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot nilai indeks	Nilai indeks per mutu air
Memenuhi	1	13%	70	8,8
Cemar Ringan	6	75%	50	37,50
Cemar Sedang	1	13%	30	3,75
Cemar Berat	0	0%	10	0,00
total	8	100%		50,00

Indeks Kualitas Air tidak mencapai target karena :

1. Terjadi pencemaran di sungai akibat limbah (buangan) baik dari aktivitas rumah tangga maupun daerah industri yang mengganggu ekosistem sungai. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai, ada beberapa parameter yang melebihi baku mutu air, yaitu parameter COD (kebutuhan oksigen kimia) dan TSS (total padatan tersuspensi).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air
2. Penetapan daya tampung beban pencemaran air.
3. Penetapan baku mutu air limbah.
4. Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air.
5. Perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
6. Pemantauan kualitas air.
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
8. Penyediaan informasi mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

- Indeks Kualitas Udara, nilai realisasi capaian diperoleh dari :

Parameter	Rerata Pemantauan	Baku Mutu	Indeks
NO ₂	5.9625	40	0,149063
SO ₂	8.63125	20	0,431563
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,290313
Indeks Kualitas Udara			89,42708



Indeks Kualitas Udara mencapai target karena :

1. Upaya pengendalian pencemaran udara melalui pemantauan kualitas udara ambien.
2. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau gangguan.

- Indeks Tutupan Hutan, realisasi capaian diperoleh dari :

Luas Hutan / Lahan (km²)	Luas Wilayah (km²)	Persentase Luas Tutupan Hutan / Lahan	ITH
351081,46	970387,845	36,17949893	55,6901463

Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target karena :

1. Kewenangan Kabupaten dalam rehabilitasi hutan dan lahan terbatas (sesuai UU No. 23/2014)
2. Urusan pemerintah bidang kehutanan mulai dari perencanaan hutan, pengelolaan hutan, konservasi SDA hayati dan ekosistemnya, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, pengelolaan DAS, serta pengawasan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
3. Urusan pemerintah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah pengolaan TAHURA Kabupaten, sementara TAHURA diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat belum ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan kepada Provinsi dan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan RHL di Kabupaten

- Data Indeks Resiko Bencana tidak tersedia, berdasarkan penjelasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penghitungan Indeks Risiko Bencana harus



dilakukan melalui kajian risiko bencana untuk memperoleh data sebagai dasar perhitungan dengan menggunakan sistem dan metodologi tertentu yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2018 penghitungan Indeks Risiko Bencana belum dapat dilakukan karena kegiatan kajian risiko bencana belum dianggarkan oleh BPBD. Pada tahun 2019 BPBD telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pengkajian Risiko Bencana, sehingga pada akhir tahun 2019 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan penghitungan. Data hasil pengkajian risiko bencana tahun 2019 akan dijadikan *database* yang akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Inarisk yang dikelola oleh BNPB, untuk selanjutnya BPBD akan meminta asistensi kepada BNPB supaya dapat mengunggah data ke dalam sistem aplikasi Inarisk secara mandiri. Perlu diketahui bahwa apabila kabupaten telah menginput data sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam system aplikasi Inarisk, maka nilai kategori kerawanan bencana kabupaten bisa diperbaharui secara mandiri dan online, dengan demikian kegiatan pengkajian risiko bencana tidak harus dilakukan setiap tahun.

**Tabel 3.17. Analisis Pencapaian Sasaran 4.1
Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Taun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	%	0,65	N/A	N/A	0,68	N/A	N/a
Rata-Rata Capaian Kinerja								N/A

Sumber: Data diolah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator sasaran Indeks Toleransi (Inklusi Sosial) tidak tersedia. Capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 0 % dikategorikan Kurang.

**Tabel 3.18. Analisis Pencapaian Sasaran 4.2
Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan
Partisipasi Masyarakat Desa**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Taun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Desa Mandiri	%	N/A	N/A	N/A	5	0	0
Rata-Rata Capaian Kinerja								0

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator sasaran **Persentase Desa Mandiri** tidak mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 0 % dikategorikan Kurang.

- Persentase Desa Mandiri, nilai realisasi diperoleh dari :

1. Belum ada Desa Mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tingkatan capaian kategori desa adalah sebagai berikut : ada 4 Desa Kategori Maju, 24 Desa Kategori Berkembang, 45 Desa Kategori Tertinggal dan 8 Desa Kategori Sangat Tertinggal dan berdasarkan Surat Kemendesa PDTT No. 15/PR.01.02/II/2018 tentang Pemutakhiran IDM 2018 untuk Pengukuran Status Perkembangan Desa Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sudah ada peningkatan yang signifikan dari perkembangan desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, walaupun belum ada yang mencapai status Desa Mandiri. Berdasarkan surat tersebut diatas sudah

ada 16 Desa Kategori Maju, 41 Desa Kategori Berkembang, 23 Desa Kategori Tertinggal dan tinggal 1 Desa Kategori Sangat Tertinggal.

Persentase Desa Mandiri, Tidak mencapai target dikarenakan :

1. Indikator-indikator untuk mencapai status Desa Mandiri sesuai Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari a) Indeks Ketahanan Sosial, b) Indeks Ketahanan Ekonomi dan c) Indeks Ketahanan Lingkungan dengan elemen-elemen didalamnya yang mensyaratkan peran serta lebih dari semua pengampu kepentingan di Kabupaten Kotawaringin Barat, karena tidak mungkin Dinas PMD sendiri bisa mencapai perangkat-perangkat indikator yang ada seperti akses jalan, kesehatan atau Pendidikan.
 2. Masih lemahnya SDM di desa dalam menemukani potensi-potensi baik sosial maupun ekonomi di desanya sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, berikut solusi untuk penyelesaian masalah, yaitu :
1. Melakukan koordinasi dan meminta komitmen lebih dari semua pengampu kepentingan dalam rangka pemenuhan indikator-indikator yang ada dalam penilaian Indeks Desa Membangun agar dapat mewujudkan Desa Mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 2. Meningkatkan komitmen semua pengampu kepentingan baik desa maupun kabupaten untuk bersama-sama berusaha mewujudkan Desa Mandiri dengan rencana aksi yang terukur.
 3. Meningkatkan kapasitas SDM di desa dengan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi agar dapat menemukani potensi-potensi yang ada di desanya.



**Tabel 3.19. Analisis Pencapaian Sasaran 4.3
Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya
Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pemberdayaan Gender	%	92,69	90,01	97,10	94,01	98,01	104,25
2	Kategori Kabupaten Layak Anak	%	Pratama (501-600)	Inisiasi (283,5)	56,58	Pratama (501-600)	Inisiasi (338,25)	67,51
Rata-Rata Capaian Kinerja					76,84			85,88

Sumber: Data Diolah oleh Dinas P3AP2Kb Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran indikator “**Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kabupaten Layak anak**” 1 Indikator sasaran melebihi dari target yang telah ditentukan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 104,25 % dengan kategori Sangat Baik, sedangkan 1 indikator sasaran tidak mencapai target dengan capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 67,51 % dengan kategori Cukup Baik. Rata-rata Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 85,88 %, dikategorikan Baik.

- Indeks Pemberdayaan Gender dan kategori Kabupaten layak anak, nilai realisasi diperoleh dari rilis data oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indeks Pemberdayaan Gender, mencapai target dikarenakan :
 1. Bekerja sama dengan Organisasi Wanita yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan sosialisasi / pelatihan tentang pemberdayaan perempuan, bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

- Kategori Kabupaten Layak Anak, tidak mencapai target dikarenakan :
 1. Belum ada kerjasama dengan instansi terkait yang mendukung terpenuhinya indikator KLA
 2. Belum berfungsinya Gugus Tugas KLA
 3. Instansi terkait belum memahami program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator KLA
- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, berikut solusi untuk penyelesaian masalah, yaitu :
 1. Menyusun indikator KLA di setiap instansi terkait
 2. Evaluasi KLA dengan Gugus Tugas KLA secara berkala

**Tabel 3.20. Analisis Pencapaian Sasaran 5.1
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum.**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya	%	10	13,72	137,2	20	15,55	77,75
Rata-Rata Capaian Kinerja					137,2			77,75

Sumber: Data diolah oleh Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum” tidak mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 77,75 % mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 137,2%, akan tetapi tetap dikategorikan Baik.



- Persentase Penurunan Pelanggaran Perda, nilai realisasi capaian diperoleh dari 135 kasus yang ditangani bidang penegakan perda dan perkara namun yang sudah proses sidang hanya 21 kasus.

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda, tidak mencapai target dikarenakan :

- Masih tertundanya proses sidang di pengadilan.
- Tenaga PPNS yang tersedia di Satpol PP dan Damkar masih sangat kurang.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, solusi untuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut :

- Mempercepat proses BAP dan pelaksanaan persidangan sesuai dengan jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Menambah PPNS di Satpol PP dan Damkar

**Tabel 3.21. Analisis Pencapaian Sasaran 6.1
Meningkatnya Industri Kepariwisata.**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Lama Tinggal	hari	2	2	100	2	2,2	110
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	orang	15.000	15.173	101,15	15.000	18.834	125,56
3	Jumlah Wisatawan Nusantara	orang	90.000	96.309	107,01	90.000	133,572	148,41
4	<i>Spending of Money</i>	milyar	86	92,34	107,37	86	102,54	119,23
Rata-Rata Capaian Kinerja					103,88			123,3

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari tabel di atas diketahui bahwa 4 indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi, melebihi dari target yang telah

ditentukan. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 123,3 % mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 103,88%, dikategorikan Baik Sekali.

- Rata-rata Lama Tinggal, nilai realisasi capaian diperoleh dari :

$$\text{Rata-rata Lama Tinggal} = \frac{\text{Tamu datang (Guest Arrival)}}{\text{Tamu yang menginap (guest Night)}} \times 100\%$$

Rata-rata Lama Tinggal mencapai target dikarenakan :

- a. Meningkatnya pengembangan destinasi wisata (atraksi, aksesibilitas, amenities). Dinas Pariwisata telah menambah banyak event atau festival dimana dapat menjadi alasan tambahan bagi para wisatawan untuk dapat tinggal lebih lama di Kabupaten Kotawaringin Barat, disamping itu saat ini juga telah banyak destinasi wisata yang telah dikelola oleh pihak lain seperti Kesultanan Mangkubumi, Istana kuning yang tentunya menarik bagi wisatawan terutama dari asing yang ingin melihat budaya lokal (atraksi).
 - b. Sarana transportasi, komunikasi dan infrastruktur menuju ke tempat wisata telah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah sehingga kemudahan ini menjadi alasan bertambahnya jumlah tinggal wisatawan.
 - c. Fasilitas pendukung lainnya berupa hotel, tempat makan/kuliner lokal juga telah banyak dikembangkan oleh pihak swasta sehingga menambah kenyamanan tinggal bagi wisatawan. Sarana pendukung lainnya seperti toilet, tempat ibadah ditempat wisata juga sudah mulai dibangun oleh Dinas Pariwisata (amenitas). Kenyamanan - kenyamanan inilah yang membuat para wisatawan menambah lama tinggal mereka di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, mencapai target dikarenakan :



- a. Dilaksanakannya promosi keluar daerah secara langsung melalui pameran yang pada tahun 2018 dilaksanakan di Bali dan Solo dengan tujuan memperkenalkan kekayaan dan kebudayaan lokal daerah pada para pengunjung stand.
 - b. Promosi secara tidak langsung melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata seperti festival yang bisa mendongkrak jumlah wisatawan berkunjung seperti kegiatan Sail Indonesia.
- *Spending of Money*, nilai realisasi capaian diperoleh dari :
1. Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting:
 - a. Jumlah wisman x Per Pax on Boat (Rp.5.000.000)
 - b. Jumlah wisnu x Per Pax on Boat (Rp.2.500.000)
 - c. Jumlah wisnu x Per orang (Rp.150.000)
 1. Obyek wisata Bugam Raya :
 - a. Jumlah wisnu x Per orang (Rp.100.000)

Spending of Money, mencapai target dikarenakan :

- a. Dengan bertambahnya lama tinggal para wisatawan tentunya hal ini berdampak pula pada bertambahnya jumlah uang yang dikeluarkan oleh para wisatawan. Namun demikian hal ini belum dapat menambah jumlah PAD kita dikarenakan belum maksimalnya uang retribusi masuk ke wisata.



**Tabel 3.22. Analisis Pencapaian Sasaran 6.2
Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase cagar Budaya yang Lestari	%	6	12	200	24	33	137,5
Rata-Rata Capaian Kinerja					200			137,5

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator sasaran **Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya** melebihi dari target yang telah ditentukan. Capaian kinerja sasaran pada 2018 adalah sebesar 137,5% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 200%, hasil capaian dikategorikan Baik Sekali.

- Persentase cagar Budaya yang Lestari, nilai realisasi capaian diperoleh dari :

$$\text{Persentase cagar Budaya yang Lestari} = \frac{\text{Total situs cagar budaya yang Lestari}}{\text{Cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah}} \times 100$$

Persentase cagar Budaya yang Lestari mencapai target dikarenakan :

1. Dari 18 cagar budaya yang ada, Pemerintah Daerah telah melakukan melakukan pelestarian pada 6 cagar budaya, yaitu dengan merehab bangunan, pembersihan dan pengecatan serta pengadaan perlengkapan penunjang kegiatan pelestarian tersebut seperti lemari, ambal dll.



3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

Dari Target Anggaran Pendapatan yang direncanakan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp.1.262.172.182.639,51. Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi - strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tersebut dapat direduksi



secara lebih khusus dalam bidang pendapatan. Sumber penerimaan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Memperhatikan beberapa komponen penerimaan daerah di atas, maka penting untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) karena merupakan sumber pendapatan yang strategis bagi pemerintah daerah apabila mampu digali dan dikelola secara optimal tanpa mengabaikan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa pos penerimaan meliputi :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik dari PAD maupun melalui alokasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk itu, pemerintah daerah telah merumuskan sejumlah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi penerimaan pajak daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan sektor formal maupun informal;
- b. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu upaya peningkatan penerimaan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah di berbagai sektor formal maupun informal;



- c. Membangun dan mengembangkan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan jasa;
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan;
- f. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan aset daerah;
- g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme aparatur dan lain-lain.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah hendaknya tidak menambah beban masyarakat yang dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maka pilihan yang terbaik adalah melakukan penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan, dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli dan hasil usaha daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Perimbangan dari Pusat merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pengalokasian dana dari Pemerintah Pusat. Penganggaran dana perimbangan bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyusunan APBD, dan mengurangi/memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab pusat kepada daerah.



Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.23. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018
Per 31 Desember 2019**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.304.958.050.000,00	1.262.172.182.639,51	(42.785.867.360,49)	96,72
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	199.627.141.000,00	179.642.616.650,32	(19.984.524.349,68)	89,99
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	70.180.000.000,00	61.675.813.242,39	(8.504.186.757,61)	87,88
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.938.816.000,00	11.159.101.245,25	(6.779.714.754,75)	62,21
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.495.000.000,00	9.017.096.032,00	(477.903.968,00)	94,97
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102.013.325.000,00	97.790.606.130,68	(4.222.718.869,32)	95,86
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.105.330.909.000,00	1.082.529.565.989,19	(22.801.343.010,81)	97,94
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	895.502.667.000,00	913.940.904.918,00	18.438.237.918,00	102,06
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	43.791.952.000,00	58.202.068.656,00	14.410.116.656,00	132,91
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	25.926.376.000,00	33.240.514.042,00	7.314.138.042,00	128,21
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	652.906.913.000,00	652.906.913.000,00	-	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	172.877.426.000,00	169.591.409.220,00	(3.286.016.780,00)	98,10
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	83.595.758.000,00	82.997.882.799,00	(597.875.201,00)	99,28
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	83.595.758.000,00	82.997.882.799,00	(597.875.201,00)	99,28
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	73.725.351.000,00	78.916.717.559,19	5.191.366.559,19	107,04
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.725.351.000,00	78.916.717.559,19	5.191.366.559,19	107,04
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	52.507.133.000,00	6.674.060.713,00	(45.833.072.287,00)	12,71

1.3.1	Pendapatan Hibah	38.813.000.000,00	3.483.000.000,00	(35.330.000.000,00)	8,97
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	13.694.133.000,00	3.191.060.713,00	(10.503.072.287,00)	23,30
JUMLAH		1.304.958.050.000,00	1.262.172.182.639,51	(42.785.867.360,49)	96,72

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kab. Kotawaringin Barat, untuk periode 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018

*) *Unaudited*

3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk membiayai program kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dengan tetap mengalokasikan anggaran sebesar 20 % untuk urusan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 % anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta penambahan alokasi dana desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin.

II. Aspek Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan prospektif dan mendukung percepatan kawasan/kluster industri berbasis pertanian.

III. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/interisolasi, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan Ro-Ro, dan bandara bertaraf internasional;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi;



4. Mempercepat reformasi birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang *capable* dan *responsible*, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas dapat menuju *good governance* dengan efektif;
5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan IPM;
6. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat dan lain-lain dan menggantikannya ke dalam skema penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dalam upaya penyediaan kegiatan berskala kecil/desa;
8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif;
9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk investasi bidang pendidikan.



Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah Tahun anggaran 2018 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Orientasi penyusunan APBD Tahun 2018 disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing – masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.24. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Per 31 Desember 2019**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	BELANJA	1.226.802.997.399,00	1.148.548.256.133,15	(78.254.741.265,85)	93,62
2.1	BELANJA OPERASI	874.505.712.374,01	807.699.468.993,03	(66.806.243.380,98)	92,36
2.1.1	Belanja Pegawai	464.550.255.125,80	441.908.290.150,00	(22.641.964.975,80)	95,13
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371.318.374.742,21	330.086.324.112,71	(41.232.050.629,50)	88,90
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	

2.1.5	Belanja Hibah	36.189.082.506,00	34.074.604.730,32	(2.114.477.775,68)	94,16
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.448.000.000,00	1.630.250.000,00	(817.750.000,00)	66,60
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	141.860.980.001,00	138.890.854.825,00	(2.970.125.176,00)	97,91
2.2	BELANJA MODAL	351.475.839.024,99	340.848.787.140,12	(10.627.051.884,87)	96,98
2.2.1	Belanja Tanah	547.300.000,00	358.789.800,00	(188.510.200,00)	65,56
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	50.157.031.118,99	47.906.159.459,20	(2.250.871.659,79)	95,51
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	98.519.367.060,00	94.378.659.526,67	(4.140.707.533,33)	95,80
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	191.323.745.286,00	189.391.047.684,25	(1.932.697.601,75)	98,99
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.426.354.300,00	5.788.877.730,00	(1.637.476.570,00)	77,95
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	3.502.041.260,00	3.025.252.940,00	(476.788.320,00)	86,39
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	821.446.000,00	0,00	(821.446.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	821.446.000,00	0,00	(821.446.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER	10.184.734.600,00	8.174.154.300,00	(2.010.580.300,00)	80,26
2.4.1	Belanja Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Desa	10.184.734.600,00	8.174.154.300,00	(2.010.580.300,00)	80,26

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ktw. Barat, untuk periode 01 Januari 2018-31 Desember 2018

*) Realisasi Anggaran per 08 Maret 2019



BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja, diketahui bahwa **18 indikator** sasaran atau **50 %** bermakna **Baik Sekali**, **13 indikator** sasaran atau **36,11 %** bermakna **Baik**, **2 indikator** sasaran atau **5,56 %** bermakna **Cukup Baik**, dan **3 indikator** sasaran atau **8,33 %** bermakna **Kurang**. Rata-rata realisasi capaian kinerja Tahun 2018 mencapai **126,9 %** atau bermakna **Sangat Baik**. Capaian kinerja tahun 2018 mencapai **126,9 %** mengalami kenaikan 30,21% jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 yang mencapai **96,69 %**.

Namun demikian, ada 12 Indikator kinerja yang belum mencapai target, antara lain :

1. Nilai SAKIP Kabupaten
2. Indeks Profesionalitas ASN
3. Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik
4. Angka Harapan Lama Sekolah
5. Rata-Rata lama sekolah
6. Jumlah pengunjung perpustakaan
7. Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi
8. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
9. Indeks Kualitas Air



10. Indeks Tutupan Hutan
11. Kategori Kabupaten Layak Anak
12. Pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya

Permasalahan dan Solusi :

1. Nilai SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum maksimal dikarenakan pemerintah masih berfokus kepada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output, belum memberikan outcome yang nyata kepada masyarakat sehingga terjadi inefisiensi anggaran pemerintah. Oleh karena itu diperlukan perubahan IKU yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati dan melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan pendanaan pada kegiatan yang mendukung terwujudnya visi misi tersebut.
2. Belum terpenuhinya indeks profesionalitas ASN disebabkan oleh masih banyak Pejabat Struktural yang belum di diklat pim, tingkat pendidikan pejabat masih di bawah Sarjana Strata 1, dan terbatasnya diklat teknis untuk peningkatan kompetensi ASN. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dana oleh pemerintah untuk pelaksanaan diklat tersebut.
3. Belum ada inovasi dalam hal peningkatan pelayanan, standar pelayanan belum terpublikasi dengan baik, sarana prasarana belum memadai sebagai unit pelayanan yang prima dan sebagian SDM belum memenuhi standar pelayanan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi baru dalam hal pelayanan publik dengan kriteria mudah, murah, cepat dengan SOP yang telah ditentukan, meningkatkan kapasitas sarana prasarana pendukung untuk kenyamanan pelayanan, dan



meningkatkan kapasitas SDM dengan memberikan diklat atau dengan *sistem reward and funishment*.

4. Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah dikarenakan belum maksimalnya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Pendidikan Sekolah Dasar, Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Kurangnya sarana dan prasarana kependidikan. Oleh karena itu diperlukan Standarisasi Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Pendidikan Sekolah Dasar, Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan peningkatan sarana dan prasarana kependidikan.
5. Rendahnya Rata-Rata lama sekolah dikarenakan belum maksimalnya program Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan) yaitu peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik) dan belum maksimalnya Bantuan Sosial Pendidikan atau Beasiswa bagi Siswa Berprestasi. Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan mutu SDM pendidik dan menambah jumlah pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi.
6. Pada dasarnya peningkatan pengunjung perpustakaan terjadi peningkatan dari tahun 2017, oleh karena itu diperlukan reuiu atas Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD.
7. Pada dasarnya cabang olah raga yang berprestasi terjadi peningkatan cukup pesat dari tahun 2017, oleh karena itu diperlukan reuiu atas Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD.
8. Rendahnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan diakibatkan produksi barang kebutuhan masyakat sudah mulai dapat diproduksi di dalam daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PDRB sektor perdagangan perlu melakukan penimngkatan pemasaran barang sektor unggulan di Kotawaringin Barat keluar daerah.



9. Penurunan kualitas air dikarenakan pencemaran di sungai akibat limbah (buangan) baik dari aktivitas rumah tangga maupun daerah industri yang mengganggu ekosistem sungai. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai, ada beberapa parameter yang melebihi baku mutu air, yaitu parameter COD (kebutuhan oksigen kimia) dan TSS (total padatan tersuspensi). Oleh karena itu, diperlukan penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air dan pengetatan perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
10. Rendahnya Indeks Tutupan Hutan dikarenakan kewenangan Kabupaten dalam rehabilitasi hutan dan lahan terbatas (sesuai UU No. 23/2014), oleh karena itu perlu mengusulkan kepada Provinsi dan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan RHL di Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Belum tercapainya kategori Kabupaten Layak Anak karena belum ada kerjasama dengan instansi terkait yang mendukung terpenuhinya indikator KLA dan belum berfungsinya Gugus Tugas KLA. Oleh karena itu, perlu Menyusun indikator KLA di setiap instansi terkait dan Evaluasi KLA dengan Gugus Tugas KLA secara berkala.
12. Belum tercapainya penurunan pelanggaran perda dikarenakan dari 135 kasus yang ditangani bidang penegakan perda dan perkara namun yang sudah proses sidang hanya 21 kasus. Oleh karena itu, perlu mempercepat proses BAP dan pelaksanaan persidangan sesuai dengan jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan menambah PPNS sesuai kebutuhan.



Secara umum pencapaian target terhadap beberapa indikator yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terpenuhi sesuai harapan. Adapun beberapa indikator sasaran yang belum mencapai target hal ini disebabkan adanya kekurangan dan kelemahan dari sebuah sistem, dan kita harapkan bahwa kekurangan dan kelemahan tersebut semoga dapat menjadi motivasi untuk peningkatan dimasa yang akan datang.

Pangkalan Bun, 28 Maret 2019

The official seal of the Bupati of Kotawaringin Barat, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI KOTAWARINGIN BARAT' and 'KOTAWARINGIN BARAT'.
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
A blue handwritten signature in cursive script.
HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT

Jalan HM.Rafi'I No. 16 PANGKALAN BUN-KALIMANTAN TENGAH
Telp. (0532) 24475-24476 Fax (0532) 24475

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalan Bun, 26 Maret 2019

INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Agus Suparji
AGUS SUPARJI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 198603 1 017

PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	1	Opini Atas Audit BPK	skor	WTP	WTP	100
2	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	2	Nilai SAKIP Kabupaten	skor	B	CC	92.48
		3	Indeks Profesional ASN	%	77	64.97	84.37
		4	Maturitas SPIP	Level	3	3	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	5	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government	Indeks	1,89	1.89	100
		6	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik	Skor	87	82.74	95.1
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	7	Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	%	70	71.88	102.68
5	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	8	Angka Harapan Lama Sekolah	Thn	12,80	12.69	99.14
		9	Rata-Rata lama sekolah	Thn	8,43	8.35	99.05
		10	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	134760	133831	99.31
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	11	Angka Harapan Hidup	Thn	70,21	71.34	101.6
		12	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	60	70	116.66
7	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga.	13	Jumlah Cabang Olah Raga yang memperoleh prestasi	%	29	16	55.17
8	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Skunder Unggulan.	14	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5,80	9,01	155.34
		15	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,50	5,96	79.46



		16	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	%	6,30	7,73	122.69
		17	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,9	96,8	104.19
9	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.	18	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	%	2,16	1116,54	1116,54
		19	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	%	11,81	14,24	120.55
10	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.	20	Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten	%	83,10	100	120.33
11	Meningkatnya Keberdayaan PMKS Dalam Mengakses Sektor-Sektor Strategis	21	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	%	17	13,03	130.46
12	Meningkatnya Kesempatan Dan Daya Saing Masyarakat Dalam Mengakses Sumber-Sumber Ekonomi	22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,93	2,17	135.02
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana.	23	Indeks Kualitas Air	%	53	50	94.33
		24	Indeks Kualitas Udara	%	60	89,42	149.03
		25	Indeks Tutupan Hutan	%	59	55,69	94.38
		26	Indeks Resiko Bencana	%	108	N/A	0
14	Meningkatnya Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama	27	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	%	0,65	N/A	N/A
15	Meningkatnya Status Desa Mandiri Melalui Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa	28	Persentase Desa Mandiri	%	5	0	0
16	Meningkatnya Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan Anak Sebagai Upaya Kesetaraan Gender dan Kondusifitas Kota/Kabupaten Layak Anak	29	Indeks Pemberdayaan Gender	%	94,01	98,01	104.25
		30	Kategori Kabupaten Layak Anak	%	Pratama (501-600)	Inisiasi (338,25)	67.51
17	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum.	31	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda terhadap Tahun Sebelumnya	%	20	15,55	77.75
18	Meningkatnya Industri Kepariwisata.	32	Rata-rata Lama Tinggal	hari	2	2,2	110
		33	Jumlah Wisatawan Mancanegara	orang	15.000	18.834	125.56

		34	Jumlah Wisatawan Nusantara	orang	90.000	133,572	148.41
		35	<i>Spending of Money</i>	Milyar	86	102,54	119.23
19	Meningkatnya Kelestarian Seni dan Cagar Budaya	36	Persentase cagar Budaya yang Lestari	%	24	33	137.5

- Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.305.378.050.000,00

Pangkalan Bun, Januari 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	1	Opini atas audit BPK	Skor	WTP
2	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan aparatur	2	Nilai SAKIP Kabupaten	Skor	B
		3	Indeks Profesionalitas Aparatur	NA	Meningkat
		4	Maturitas SPIP	Level	Level 2
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	5	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan E-Government	%	50%
		6	Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik	Skor	65
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	7	Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu.	%	70
5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80
		9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,43
		10	Indeks Minat Baca	Indeks	10
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11	Angka Harapan Hidup	Tahun	72
		12	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	50
7	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	13	Persentase peningkatan peraih Prestasi Pemuda	%	25
8	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	14	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5
		15	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5
		16	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	%	10
		17	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,9
		18	Persentase Koperasi Usaha Mikro yang berkualitas	%	5,5



9	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	19	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	13,00
		20	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	%	8
		21	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	Rasio	11,81
10	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	22	Indeks Williamson	Indeks	Menurun
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	23	Indeks Kualitas Air	Indeks	53
		24	Indeks Kualitas Udara	Indeks	60
		25	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	59
		26	Indeks Resiko Bencana	Indeks	108
12	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	27	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	%	0,68
13	Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	28	Persentase Desa Mandiri	%	5
14	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusivitas Kabupaten layak anak	29	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,01
		30	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama
15	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	31	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	%	17,00
16	Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,93
17	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	33	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	%	10
18	Meningkatnya Nilai Kearifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata	34	Persentase Destinasi Wisata Khas lokal	%	70
		35	Persentase Jenis Produk Lokal Kepariwisataaan	%	20
19	Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataaan	36	Persentase Peningkatan Wisman dan Wisnus	%	20

RENCANA KERJA TAHUNAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	1	Opini atas audit BPK	Skor	WTP
2	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan aparatur	2	Nilai SAKIP Kabupaten	Skor	B
		3	Indeks Profesionalitas Aparatur	NA	Meningkat
		4	Maturitas SPIP	Level	Level 2
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	5	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan E-Government	%	50%
		6	Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik	Skor	65
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	7	Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu.	%	70
5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80
		9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,43
		10	Indeks Minat Baca	Indeks	10
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11	Angka Harapan Hidup	Tahun	72
		12	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	50
7	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	13	Persentase peningkatan peraih Prestasi Pemuda	%	25
8	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	14	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5
		15	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5
		16	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	%	10
		17	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,9
		18	Persentase Koperasi Usaha Mikro yang berkualitas	%	5,5
		19	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	13,00
9	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	20	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	%	8



		21	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	Rasio	11,81
10	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	22	Indeks Williamson	Indeks	Menurun
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	23	Indeks Kualitas Air	Indeks	53
		24	Indeks Kualitas Udara	Indeks	60
		25	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	59
		26	Indeks Resiko Bencana	Indeks	108
12	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	27	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	%	0,68
13	Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	28	Persentase Desa Mandiri	%	5
14	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusivitas Kabupaten layak anak	29	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,01
		30	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama
15	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	31	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	%	17,00
16	Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,93
17	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	33	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	%	10
18	Meningkatnya Nilai Kearifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata	34	Persentase Destinasi Wisata Khas lokal	%	70
		35	Persentase Jenis Produk Lokal Kepariwisataaan	%	20
19	Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataaan	36	Persentase Peningkatan Wisman dan Wisnus	%	20
		37	Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	%	10

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018

No	Tanggal	Penyelenggara	Jenis Penghargaan	Keterangan
1	14 Januari 2019	Kementerian Lingkungan Hidup	Penghargaan Adipura ke 12	Penilaian Adipura Tahun 2018 kembali diraih Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dipastikan meraih penghargaan Adipura (tahun 2018). Penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan itu merupakan penghargaan ke-12 yang diterima Bumi Marunting Batu Aji sejak tahun 2006 silam.
2	05 Juli 2018	Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI)	Perpustakaan Daerah terbaik, Penghargaan lomba cerita <i>imfact</i> terbaik kategori tulisan cerita, dan Perpustakaan Desa terbaik	Kegiatan PLM (<i>Peer Learning Meeting</i>) di Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 1467 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pendukung kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis TIK mitra perpuseru yang bertujuan untuk menginformasikan capaian selama kurang lebih 7 tahun kemitraan perpustakaan dengan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI), sebagai ajang untuk berbagi pengalaman dari penerima <i>imfact</i> dan juga bahan evaluasi atas pelaksanaan program serta penyerahan kelanjutan program transformasi perpuseru dari CCFI kepada Perpunas RI (akhir kemitraan). Kabupaten Kobar menerima 13 penghargaan sekaligus dengan kategori, yakni perpustakaan daerah terbaik yang diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kobar, penghargaan lomba cerita <i>imfact</i> terbaik kategori tulisan cerita diterima oleh Perpusdes Sungai Kapitan dan Perpusdes Tanjung Trantang, dan untuk kategori perpustakaan desa terbaik diraih oleh Perpustakaan Desa Batu Belaman, Perpusdes Pasir Panjang, Perpusdes Pandu Sanjaya, Perpudes Pangkalan Dewa, Perpusdes Melawen Harati, Perpusdes Sumber Agung, Perpusdes Terantang, Perpusdes Kumpai Batu Bawah dan Perpusdes Kelurahan Baru Generasi Cerdas.



3	23 November 2018	BPJS Ketenagakerjaan Pusat	Penghargaan Paritrona 2018	Penilaian terhadap kepedulian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada para buruh, karyawan, dan pegawai yang bekerja, baik di perusahaan swasta maupun pemerintah.
4	01 Desember 2018	Kementerian Pariwisata	Pemenang Hijau	Destinasi wisata Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pariwisata pada ajang Indonesia <i>Sustainable Tourism Award</i> (ISTA) 2018 pada kategori 'pemenang hijau'. Ajang ISTA 2018 merupakan penyelenggaraan yang digelar untuk kedua kalinya oleh Kementerian Pariwisata, untuk tahun ini mengangkat tema ' <i>Local Wisdom for Sustainable Development</i> ' (kearifan lokal untuk pariwisata berkelanjutan). TNTP sendiri oleh pihak kementerian pariwisata ditetapkan masuk 17 pemenang pengelola destinasi wisata yang mampu menerapkan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism</i>) dari jumlah pendaftar sebanyak 176 destinasi wisata.
5	22 Desember 2018	Kementerian Lingkungan Hidup	Anugerah Adiwiyata Nasional	Penghargaan diberikan kepada 7 sekolah di Kabupaten Kotawaringin barat yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, rinciannya sekolah dasar (SD) dan 2 SMP. Yakni SDS Astra Agro Lestari, SDS Bumitama 1, SDS Harapan Sejahtera, SDS Pesona Astra, SDS Surya Perdana, SMP Astra Agro Lestari dan SMP Indah Makmur



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa memperhatikan rekomendasi Tim Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB yang dituangkan dalam Risalah Hasil pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Kinerja adalah hasil/keluaran dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disebut IKU, adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program pemerintah daerah yang telah direncanakan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Bupati dan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Bupati dan SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Keluaran (*output*) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang atau jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan IKU Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sasaran Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- a. menetapkan rencana kerja pemerintah daerah ;
 - b. menetapkan rencana kinerja tahunan dan penganggarannya;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022.

Pasal 5

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari indikator hasil (*outcome*).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR : 50

INDIKATOR KINERJA UTAMA

VISI : "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Misi 1 : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.											
Tujuan : Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)											
Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi											
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	C	CC	B	A	A	A	A	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Sekretariat Daerah
		Indeks Profesionalitas Aparatur	N/A	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Program perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Indeks Profesionalitas Aparatur	N/A	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang benar dan tepat waktu	N/A	65%	70%	80%	85%	90%	90%	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Sekretariat Daerah
									Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.										
Tujuan : Meningkatkan kualitas kualitas sumberdaya manusia										
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia										
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12.42	12.61	12.8	13	13.19	13.38	13.57	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-Rata Lama Sekolah	8.05	8.24	8.43	8.63	8.82	9.01	9.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	93,736	124,582	134,760	145,030	155,100	165,150	175,200	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.21	70.4	70.59	70.79	70.98	71.17	71.36	Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	Dinas Kesehatan
	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	N/A	50%	60%	70%	80%	90%	90%	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	RSUD
3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah cabang olah raga yang memperoleh prestasi di tingkat :								Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
	pusat regional	N/A	1 cabor	2 cabor	3 cabor	4 cabor	5 cabor	6 cabor		
	provinsi	N/A	-	4 cabor	5 cabor	6 cabor	7 cabor	8 cabor		
		N/A	-	23 cabor	-	-	-	32 cabor		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Misi 3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup											
Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan											
Indikator Tujuan 1 : Pertumbuhan Ekonomi											
1.	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5.23%	9.01%	5.5%	5.75%	6.01%	6.28%	6.53%	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6.96%	5.96%	7.3%	7.50%	7.72%	7.93%	8.35%	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	5.73%	7.73%	6.30%	6.40%	6.47%	6.58%	6.58%	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
										Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
										Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84.95	N/A	92.9	93.1	93.4	93.8	94.2	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan		
2.	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	N/A	N/A	2.16%	2.17%	2.18%	2.19%	2.20%	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	N/A	14.21	11.81	11.86	11.91	11.96	12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
3. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Tingkat Konektivitas Jalan Kabupaten	N/A	77.46	83.10	88.73	94.37	100	100	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
									Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas ASDP	
Indikator Tujuan 2 : Angka Kemiskinan										
4. Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	20%	18.50%	17%	15.75%	14.50%	13.25%	12%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Dinas Sosial
5. Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.16	3.25	2.93	2.82	2.71	2.61	2.5	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikator Tujuan 3 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup										
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	Indeks Kualitas Air	N/A	50%	53%	56%	59%	62%	65%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	60%	63%	66%	69%	72%		
	Indeks Tutupan Hutan	N/A	56.83%	59%	61%	63%	65%	67%		
	Indeks Resiko Bencana	N/A	115%	108%	101%	94%	87%	80%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Misi 4 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.											
Tujuan : Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis											
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Masyarakat											
1.	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	N/A	0.65%	0.68%	0.70%	0.72%	0.74%	0.76%	Program Pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Badan Kesatuan Bangsa Politik Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri	N/A	0%	5%	5%	6%	6%	12%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak	Indeks Pemberdayaan Gender	N/A	92.69	94.01	95.33	96.65	97.98	99.3	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Kategori Kabupaten Layak Anak	N/A	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Misi 5 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.											
Tujuan : Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan											
Indikator Tujuan : Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan											
1.	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan	NA	10%	20%	30%	40%	50%	70%	Program peningkatan kemandirian dan kenyamanan lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
										Program Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Badan Kesatuan Bangsa Politik

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	OPD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Misi 6 : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata										
Tujuan : Peningkatan Pariwisata Daerah										
Indikator Tujuan : Tourism Intensity Index										
1. Meningkatkan industri kepariwisataan	Rata-rata lama tinggal	NA	2 Hari	2 Hari	3 Hari	3 Hari	4 Hari	4 Hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Jumlah wisatawan mancanegara	NA	15.000 orang	15.000 orang	15.100 orang	15.200 orang	15.300 orang	15.500 orang		
	Jumlah wisatawan nusantara	NA	90.000 orang	90.000 orang	92.000 orang	93.000 orang	94.000 orang	95.000 orang	Program pengembangan pemasaran pariwisata	
	Spending of money	NA	86 M	86 M	88 M	90 M	92 M	95 M		
2. Meningkatkan kelestarian seni dan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang lestari	NA	6%	24%	41%	59%	76%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

